

**Sistem Bagi Hasil Nelayan Cakalang
Di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan
Betoambari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara**



No. 1	HASANUDDIN
No. 2	04-05-2007
No. 3	FISIPOK
No. 4	1 (Santo) elus.
No. 5	H
No. 6	129/4-5-07
No. 7	
No. 8	
No. 9	
No. 10	

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Pada Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

Oleh
AHMAD RIZAL
E 511 00 011

**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Nelayan Cakalang
Kelurahan Bone-Bone Kecamatan
Betoambari Kota Bau-Bau Sulawesi
Tenggara

Nama Mahasiswa : Ahmad Rizal

Nomor Pokok : E511 00 011

Program Studi : Ilmu Antropologi

Jurusan : Antropologi

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing ;

Makassar, 12 April 2007

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA
Nip. 131 658 802

Pembimbing II



Drs. Supriadi Hamdat, MA
Nip. 131 846 840

Mengetahui :

Ketua Jurusan Antropologi



Dr. Munsir Lampe, MA

Nip. 131 649 649

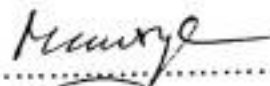
HALAMAN PENERIMAAN

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi, Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Antropologi pada hari senin, 30 April 2007.

Makassar, 30 April 2007

Panitia Ujian :

Ketua : Dr. Mungsi Lampe, MA

()

Sekretaris : Drs. Supriadi Hamdat, MA

()

Anggota : Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA

()

Drs. M. Basir Said, MA

()

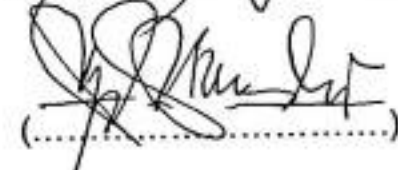
Drs. Yahya, MA

(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA

()

Drs. Supriadi Hamdat, MA

()

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sembah sujud dan Pujian tertinggi bagi Allah SWT atas karuniah ilmu-Nya yang termanifestasi dalam tiap kecerdasan dan kepintaran manusia. Sujud syukur terdalam atas rahmat dan hidayah yang merealitas dalam kehidupan tiap hamba-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"Sistem Bagi Hasil Nelayan Cakalang Di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara"** yang tentunya masih menyisakan banyak kekurangan di dalamnya.

Kehadiran tugas akhir ini tentu masih membutuhkan koreksi lebih lanjut untuk menuju penyempumaannya, bahkan penulis sangat berharap agar tugas akhir ini dapat menimbulkan polemik di kalangan ilmuan sosial yang menaruh perhatian khusus pada masalah kenelayanan yang lebih khusus pada sistem bagi hasil nelayan. Kondisi demikian menjadikan tugas akhir ini akan lebih berarti karena telah ikut memberikan sumbangsih bagi dinamika keilmuan.

Sebagaimana biasanya penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, khususnya gelar sarjana Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Hasanuddin yang nantinya membutuhkan tanggung jawab lebih besar. Sehingga dengan penuh rasa rendah diri saya serahkan hasil karya ini untuk dicermati dan dikritisi lebih lanjut oleh tiap kalangan.

Penulis tak lupa ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan ide, moril, dan materi hingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda penulis yang dengan ikhlas memberikan segalanya demi tercapainya kesarjanaan yang amat sangat diharapkan.
2. Ketua jurusan Antropologi Dr. Mungsi Lampe, MA. Pembimbing saya Prof. Dr.H. Hamka Naping, MA dan Drs. Supriadi Hamdat, MA yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis baik dalam bentuk intelektualitas maupun mentalitas sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Seluruh staf pengajar di jurusan antropologi yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu yang banyak memberikan motivasi dan kemudahan hingga selesainya tugas akhir ini.
4. Erwin Awaluddin, Arif Nurdin, Askarim, Ichsan, kerabat angkatan 2000 Antropologi serta seluruh kerabat mahasiswa Antropologi Unhas yang tak sempat penulis sebutkan namun telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

5. Adik dan Sahabat-sahabatku (Ririn, Nunu, Afhit, Hadi, Allan, Ayub, Uchynk) dan teman-temanku sepondokanku yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang banyak memberi suasana dinamis dan inspirasi kepada penulis.

Sekali lagi penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan segala sumbangannya baik materi maupun moril hingga akhir penyelesaian tugas ini.

Semoga segala upaya dan bantuan yang telah dicurahkan kepada penulis mendapat imbalan di sisi Allah, amin.

Makassar, 22 April 2007

Penulis

ABSTRAK

Sistem Bagi Hasil Nelayan Cakalang di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara merupakan judul skripsi yang di tulis oleh **Ahmad Rizal** (E 511 00 011), di bawah bimbingan **Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA** selaku pembimbing I dan **Drs. Supriadi Hamdat, MA** sebagai pembimbing II. Hasil penelitian tersebut diharapkan data atau keterangan yang dikumpulkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan langkah strategis dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan cakalang di Kelurahan Bone-Bone

Masyarakat nelayan cakalang di Bone-Bone yang mana realitas kehidupan sosial ekonomi mereka, yang lebih banyak memanfaatkan sumber daya laut utamanya dalam mata pencaharian. Yang dimana dalam masyarakat ini teramat kental nilai-nilai sistem bagi hasil. Ironinya pendapatan yang tergolong banyak tidak menjadikan kehidupan mereka mapan atau dengan kata lain bisa dikategorikan sebagai nelayan miskin.

Indikasi hal diatas berdasar pada kondisi internal sumber daya manusia yang lebih mengarah kepada asupan nilai-nilai konsumtif dalam kesehariannya sehingga berimbas pada terciptanya polarisasi kemiskinan. Kemiskinan disini tercipta bukan karena sistem pengalokasian pendapatan mereka atau dengan kata lain sistem bagi hasil yang kurang, akan tetapi karena kurangnya kemampuan untuk *mensaving* hasil pendapatan.

Hal utama pula yang menjadi tendensi penulis adalah dikarenakan asupan pendapatan yang mencukupi, maka hal ini berimbas kurangnya kemapanan dan pengetahuan pengelolaan pendapatan mereka. Konsepsi ini berawal dari pengetahuan masyarakat lokal mengenai laut, menurut beberapa informan yang diwawancarai, bahwa hasil laut selalu melimpah dan selalu menyediakan sumber ekonomi yang teramat potensial bagi kelangsungan hidup manusia, seperti ikan dan biotik laut lain yang mempunyai nilai ekonomi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Penelitian	8
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konsep.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Masyarakat Nelayan.....	17
B. Karakteristik Sosial Budaya Nelayan.....	21
C. Organisasi Kerjasama Nelayan.....	24
D. Sistem Bagi Hasil.....	32
E. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	45
1. Lokasi	45
2. Potensi Sumber Daya Alam.....	48
3. Demografi.....	48
4. Mata Pencaharian.....	51
5. Sarana dan Prasarana.....	53
6. Organisasi/Kelembagaan Sosial.....	56
7. Karakteristik Informan.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	65
A. Gambaran Tentang Aktivitas Sehari-Hari Nelayan Cakalang.....	66
B. Tipe/Kategori Kelompok Usaha Nelayan Cakalang dan Struktur Organisasinya.....	74

1. Kelompok/Organisasi Nelayan Dalam Usaha Cakalang Milik Plasma.....	74
2. Kelompok/Organisasi Nelayan Dalam Usaha Cakalang Milik Pengusaha Lokal.....	79
C. Sistem Bagi Hasil Nelayan Cakalang.....	86
D. Pranata Informal dalam Unit Usaha yang Memberi Jaminan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan ABK	89
E. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Cakalang.....	97
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel III.1.	Jumlah Penduduk Kota Bau-Bau Menurut Kecamatan Tahun 2005	50
Tabel III.2.	Distribusi Penduduk Kelurahan Bone-Bone	51
Tabel III.4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kelurahan Bone-Bone	52
Tabel III.5.	Informan menurut umur dan jenis kelamin	58
Tabel III.6.	Informan menurut pengalaman dalam aktivitas kenelayanan	60
Tabel III.7.	Informan menurut tingkat pendidikan	61
Tabel III.8.	Struktur ABK tetap pada kapal yang di miliki oleh Laode Sairi dan hubungan kekerabatannya	62
Tabel III.9.	Struktur ABK tetap pada kapal yang di kelola oleh Alimuddin dan hubungan kekerabatannya	63
Tabel III.10.	Struktur ABK tetap pada kapal yang di miliki oleh H.Kasim dan hubungan kekerabatannya	63
Tabel IV.1.	Bagian masing-masing ABK berdasarkan bagi hasil	88
Tabel IV.2.	Biaya kebutuhan hidup sehari-hari	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang biasa disebut Nusantara, yaitu suatu negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra merupakan negara maritim yang memiliki bentangan garis terpanjang di dunia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yakni kurang lebih 81.000 km. Di sepanjang garis pantai tersebut dimukimi sebanyak 67.439 desa, yang terdapat kurang lebih 4.261 desa dikategorikan sebagai desa-desa pesisir dan pulau-pulau. Berdasarkan luasnya laut tersebut sehingga penduduk pesisir pantai dan pulau-pulau memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena laut-laut Indonesia kaya akan ikan (Sudarto, 1989:5).

Potensi sumberdaya alam pesisir dan lautan Indonesia, tersebar pada 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km². Kawasan pesisir Indonesia mencapai 181 daerah administratif dan 42 kota besar, sumberdaya alam wilayah pesisir Indonesia merupakan aset bangsa yang strategis untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pesisir yang biasa disebut dengan sumberdaya pesisir terdiri dari sumberdaya hayati, non hayati dan jasa lingkungan. Unsur hayati tersebut terdiri atas; ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan biota lain beserta ekosistemnya (Dahuri, 1996:47).

Secara geografis Kawasan Timur Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara, sebahagian besar penduduknya bermukim di daerah pesisir pantai yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir dan lautan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah yang potensial untuk pengembangan wilayah maritim, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya pesisir dan lautan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan.

Potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang ada di daerah Sulawesi Tenggara, selain menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan yang hidup di wilayah pesisir, dapat pula menjadi wadah ekonomi bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomiannya. Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan lautan berupa biotik liar maupun biotik tak liar, masyarakat nelayan harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan mengatasi rintangan-rintangan alam yang ganas, serta bagaimana merekayasa sarana/prasarana teknologi eksploitasi dalam rangka memanfaatkan sumberdaya biota laut yang bernilai tinggi.

Sebahagian besar kawasan pantai tersebut bermukim penduduk nelayan dan pelayar yang dengan berbagai unsur kebudayaannya yang khas, dan mereka digolongkan sebagai komuniti-komuniti maritim. Karakteristik kemaritimannya dapat didefinisikan terutama pada model pengelolaan mata pencaharian. Kegiatan ekonomi ini terpusat pada sektor perikanan laut,

sistem pengetahuan, teknologi dan organisasi sosial yang terpusat pada pemanfaatan sumberdaya laut.

Walaupun profesi nelayan sudah cukup tua, tetapi pada beberapa kelompok masyarakat tertentu cara-cara penangkapan ikannya belum berubah. Sementara kelompok masyarakat yang telah tersentuh pengaruh modern telah mempergunakan peralatan baru sehingga mampu menjelajahi lautan yang sangat luas tanpa dirintangi oleh musim, angin maupun gelombang.

Untuk memodernisasi dan mengoperasikan peralatan tangkap, nelayan harus saling berkerjasama, karena alat-alat yang digunakan sudah beragam, hal ini serupa dengan pendapat E. Smith yang dikutip oleh Lampe, bahwa ada persepsi budaya yang kuat bahwa kerja nelayan di laut penuh resiko yang mengancam keselamatan jiwa manusia dan alat-alat yang digunakannya (Lampe :1995 :hal 8). Dengan persepsi budaya seperti ini, pola kerja nelayan menurutnya, pada umumnya dijalankan dengan kerjasama, dalam pengerahan anggota kerjasama diadakan secara selektif menurut kondisi fisik. Demikianlah maka timbul polarisasi kerjasama menurut jenis kelamin yang lebih tajam pada masyarakat nelayan bila dibandingkan dengan yang ada pada masyarakat tani atau industri, dimana kaum laki-laki (yang dianggap kuat fisiknya) kelaut, sedangkan pada umumnya kaum wanita (yang dianggap lemah fisiknya) tinggal mengurus rumah tangga atau melakukan

pekerjaan-pekerjaan lainnya, misalnya memproses atau berdagang ikan (cf.Acheson, dikutip oleh Lampe : 1995).

Pada proses perekrutan, seleksi berdasarkan peranan anggota didalam organisasi nelayan tersebut, dan bagaimana gambaran dari hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana organisasi sosial lainnya, di dalam tubuh organisasi nelayan juga dikenal adanya pimpinan dan bawahan. dimana atasan mempunyai hak untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi anggota dalam organisasi nelayan tersebut. Dari posisi-posisi tersebut menentukan pula jumlah pendapatan anggota-anggota organisasi nelayan.

Hasil penelitian Bagong Suyanto yang dikutip oleh Saad, di Pantai Utara Jawa menunjukkan rata-rata pendapatan nelayan pukat (nelayan berstatus anak buah/*pandega*) setelah mengadopsi teknologi modern adalah sekitar Rp 200.000,- sampai Rp 300.000,-/bulan. Beberapa *juragan* kapal yang merangkap sebagai pedagang ikan mengaku berpenghasilan sampai Rp. 1.000.000,-/bulan. Sementara itu, penghasilan nelayan tradisional rata-rata hanya antara Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,-/perbulan pada musim ramai ikan. Sedangkan pada musim sepi ikan pendapatan mereka di bawah Rp 50.000,-/bulan (Saad:2000:4). Ketimpangan pendapatan lebih menyolok terjadi antara pihak pemilik alat-alat produksi dan *juragan* (nahkoda) dengan lapisan anak buah di Wonokerto (Semedi, 2001:128-208). Ini ditunjukkan dengan sebuah kasus bagi hasil dari pendapatan bersih sebesar Rp 30.000.000,-, di mana Rp 12.000.000,- untuk pemilik dan Rp 18.000.000,-

dibagi antara *juragan* dan *pandega*. Setiap *pandega* hanya memperoleh Rp. 300.000,- dan *juragan* memperoleh sekitar tiga kali lipat dari yang diperoleh *pandega* (Rp. 900.000,-) ditambah dengan bonus, ekstra bonus dan super bonus dari pemilik sebesar Rp 3.000.000,-, jadi semuanya berjumlah Rp. 3.900.000,-.

Fenomena ketimpangan penghasilan antar anggota kelompok nelayan yang ditentukan oleh posisi dan peranannya dalam kelompok dan aktivitas seperti yang terjadi di mana-mana dalam komunitas nelayan. Rupanya faktor hubungan-hubungan kerja atau struktural yang merupakan faktor dominan menciptakan dan melanggengkan kondisi kemiskinan ekonomi nelayan dan desa-desa nelayan merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang potensial (Kusnadi, 2002:14).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, lebih lanjut Kusnadi menjelaskan pula bahwa, sebab-sebab kemiskinan yang berifat internal berkaitan dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Dan sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi diluar diri dan aktivitas kerja nelayan (Kusnadi 2003:19).

Mengacu pada realitas masyarakat nelayan Bone-Bone yang mana sangat relevan dengan konsep yang diuraikan diatas. Indikasi ini berdasarkan kondisi internal sumber daya manusia yang lebih mengarah kepada asupan

nilai-nilai konsumtif dalam kesehariannya sehingga berimbas pada terciptanya polarisasi kemiskinan. Kemiskinan disini tercipta bukan karena sistem pengalokasian pendapatan mereka atau dengan kata lain sistem bagi hasil yang kurang, akan tetapi karena kurangnya kemampuan untuk *mensaving* hasil pendapatan.

Kondisi ini memberikan motivator bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan Cakalang Di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara.

B. Masalah Penelitian

Definisi nelayan menurut Muchlis (1984) diartikan sebagai orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan baik di laut, selat, teluk atau danau maupun sungai dengan menggunakan perahu atau kapal dan berburu atau menggunakan perangkap.

Pada kegiatan penangkapan ikan, dibutuhkan anggota-anggota yang saling bekerjasama. Dimana anggota-anggota tersebut direkrut berdasarkan fungsinya di atas kapal. Menurut Noor dan Noor yang dikutip oleh Lampe, bahwa yang menyebabkan kerjasama dalam perikanan nelayan adalah kombinasi dari kedua faktor ekologi dan sifat dari teknologi yang digunakan (Lampe:1995:9). Hal ini sejalan dengan pendapat Parson yang dikutip oleh Saifuddin tentang perspektif struktural fungsional, bahwa setiap individu menempati suatu status dalam berbagai struktur masyarakat, yang mana

Individu menempati suatu status tertentu dianggap memiliki hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang merupakan peranan dalam status mereka (Saifuddin, 2005:23).

Kenyataannya masyarakat nelayan kelurahan Bone-Bone harus bekerjasama dan membentuk struktur dalam pencarian ikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Berdasarkan kenyataan ini, maka dari sisi akademik perlu dikaji di lapangan penelitian. Untuk itu dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur kelompok-kelompok kerjasama nelayan cakalang di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara dalam usaha perikanan lautnya?
2. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan nelayan Bone-Bone dalam usaha perikanan cakalang dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarganya?
3. Bagaimana praktek dan mekanisme lain yang menunjang bagi kondisi kesinambungan sosial ekonomi nelayan.

Pertanyaan penelitian di atas mengungkapkan mengenai : (a) gambaran tentang aktivitas sehari-hari nelayan cakalang ; (b) tipe/kategori kelompok usaha nelayan cakalang dan struktur organisasinya ; (c) sistem bagi hasil nelayan cakalang; (d) Pranata-pranata informal dalam unit usaha yang memberi jaminan sosial ekonomi keluarga nelayan ABK ; (e) pengaruh

sistem bagi hasil terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan cakalang utamanya dalam pemanfaatan hasil pendapatannya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan struktur kelompok-kelompok kerjasama nelayan nelayan cakalang di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara dalam usaha perikanan lautnya.
2. Untuk mengetahui sistem/aturan bagi hasil yang diterapkan dalam kelompok kerjasama nelayan dan menjelaskan pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi keluarga-keluarga nelayan utamanya dalam pemanfaatan hasil pendapatannya.
3. Untuk menggambarkan praktek dan mekanisme lain yang menunjang bagi kondisi kesinambungan sosial ekonomi nelayan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Kegunaan akedemik yakni diharapkan memberikan/menambah bahan acuan pengetahuan tentang sistem bagi hasil dan struktur kelompok nelayan dan pengaruhnya bagi kondisi ekonomi nelayan.
2. Data atau keterangan yang dikumpulkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan langkah strategis dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan bersangkutan.

3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

E. Kerangka Konsep

1. Struktur Kelompok/Organisasi Kerjasama Nelayan

Dalam kegiatan penangkapan ikan, dibutuhkan anggota-anggota yang saling bekerjasama. Di mana anggota-anggota tersebut direkrut berdasarkan fungsinya di atas kapal. Menurut Noor dan Noor yang dikutip oleh Lampe, bahwa yang menyebabkan kerjasama dalam perikanan nelayan adalah kombinasi dari kedua faktor ekologi dan sifat dari teknologi yang digunakan, misalnya karena alat-alat penangkapan yang digunakan berat dan rumit (Lampe:1995). Hal ini sejalan dengan pendapat Parson yang dikutip oleh Saifuddin tentang perspektif struktural fungsional, bahwa setiap individu menempati suatu status dalam berbagai struktur masyarakat, yang mana Individu menempati suatu status tertentu dianggap memiliki hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang merupakan peranan dalam status mereka (Saifuddin:2005:23).

Selanjutnya Menurut Kusnadi (2002:15), struktur kelompok perikanan nelayan berdasarkan pada tingkat penguasaan/kepemilikan alat-alat produksi atau perlalatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), sehingga nelayan terbagi kedalam kategori

nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam melakukan kegiatan produksi nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya.

Hal ini sejalan dengan dikatakan oleh E.smith yang dikutip oleh Lampe, bahwa pada masyarakat nelayan pada umumnya ada persepsi budaya yang kuat bahwa kerja nelayan di laut penuh dengan resiko yang mengancam keselamatan jiwa manusia dan alat-alat yang digunakan (Lampe:1995:8). Dengan persepsi budaya seperti ini, pola kerja nelayan pada umumnya dijalankan dengan kerjasama. Dalam pengerahan anggota kerjasama diadakan secara selektif menurut kondisi fisik. Dengan demikian timbul polarisasi kerjasama menurut jenis kelamin yang lebih tajam pada masyarakat nelayan bila dibandingkan dengan masyarakat tani atau industri, dimana kaum laki-laki (yang dianggap kuat fisiknya) kelaut, sedangkan pada umumnya kaum wanita (yang dianggap lemah fisiknya) tinggal mengurus rumah tangga atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya, misalnya memproses atau berdagang ikan.

Kemudian dalam proses perekrutan, Lampe (dalam Buletin Antropologi:1995) mengatakan, bahwa seleksi perekrutan anggota-anggota kerjasama nelayan berbeda-beda setiap kebudayaan. Ada kelompok-kelompok kerjasama nelayan yang terdiri dari orang-orang

sekerabat, ada kelompok-kelompok kerjasama nelayan yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang berteman atau sekampung.

2. Bagi hasil nelayan

Menurut Acheson yang dikutip oleh Lampe, bahwa sistem bagi hasil merupakan aturan yang sering ditemukan baik dalam perikanan-perikanan tradisional berskala kecil maupun dalam perikanan-perikanan modern. Secara umum sistem bagi hasil menetapkan aturan, bahwa setiap anggota memperoleh satu bagian pendapatan dari jumlah keseluruhan pendapatan perhari, perminggu atau perbulannya.

Dalam perikanan-perikanan yang teknologi penangkapannya sudah modern umumnya, pembagian pendapatan diadakan setelah dikeluarkan biaya-biaya untuk perbaikan alat-alat penangkapan yang rusak, bahan bakar, oli, perawatan mesin dan makanan. Besar bagian anggota tidak tetap, melainkan berdasarkan jumlah atau hasil penangkapan ikan dan turun naiknya harga ikan di pasar. Setiap anggota mendapatkan bagian yang relatif sama.

Pembagian pendapatan dalam sistem bagi hasil menunjukkan suatu fungsi kerja, hal ini tampak dalam istilah-istilah yang digunakan, seperti *bagiannya si A*, *bagiannya net (biasanya 3 bagian)*, *bagiannya perahu(biasanya 2 bagian)*, *bagiannya motor (biasanya 3 bagian)*, dan



lain-lain. Hal yang jarang digunakan adalah bagiannya si pemilik yang diperuntukkan pada alat-alat produksi, meskipun sebetulnya itu buat si pemilik juga (Lampe:1995:15).

Hal yang umum pula bahwa si pemilik juga mendapat satu bagian yang sama dengan bagian-bagian nelayan biasa, tetapi itu bukan bagian sebagai pemilik, melainkan sebagai anggota biasa karena dia ikut aktif ke laut.

Sistem bagi hasil dengan istilah-istilah bagian yang fungsional itu menunjukkan secara logis bahwa semua anggota awak kapal merupakan orang-orang yang bekerja sama, yang berhak mendapatkan hasil atau nilai kerjanya masing-masing (Acheson dikutip oleh Lampe, 1995:16).

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang sistem bagi hasil nelayan cakalang di Kelurahan Bone-Bone ini merupakan penelitian kualitatif, seperti lazimnya penelitian kualitatif, maka pelaksanaan penelitian ini, digunakan sejumlah kriteria terutama untuk penentuan lokasi penelitian, pemilihan informan dan metode pengumpulan data.

1. Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ditentukan dengan cara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- a. Kelurahan Bone-Bone merupakan kelurahan yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, dan menggunakan organisasi kenelayanan sebagai mekanisme dalam sistem perekonomiannya.
- b. Masyarakat nelayan di Kelurahan Bone-Bone disamping menetapkan sistem bagi hasil yang formal dalam kelompok, juga menetapkan mekanisme bantu-membantu yang menunjang bagi relatif bertahannya kondisi sosial ekonominya.
- c. Secara geografis Kelurahan Bone-Bone muda dijangkau karena berada di pusat Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.
- d. Penulis berasal dari Kota Bau-Bau, sehingga lebih memudahkan dalam menciptakan *rapport* dengan informan dan lebih dekat secara emosional dengan masalah penelitian.

2. Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan memperhatikan validitas data. Karena itu informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan masalah yang diteliti, dan mampu memberikan informasi yang diinginkan.

Informan-informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah nelayan yang terdiri dari ABK kapal, Nakhoda, dan bos. Selain itu informan lain juga tokoh-tokoh masyarakat dan aparat kelurahan.

3. Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, digunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observasi*)

Peneliti melakukan pengamatan (*observasi*) di lokasi penelitian khususnya pengamatan terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga-keluarga nelayan, pola permukiman penduduk, aktifitas nelayan pada saat melakukan kegiatan ekonomi, bentuk-bentuk hubungan kerjasama nelayan dan sebagainya

b. Wawancara (*interview*)

Untuk mengumpulkan data, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan informan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data-data tentang ; (a) gambaran tentang aktivitas sehari-hari nelayan cakalang ; (b) tipe/kategori kelompok usaha nelayan cakalang dan struktur organisasinya ; (c) sistem bagi hasil nelayan cakalang ; (d) Pranata-pranata informal dalam unit usaha yang memberi jaminan sosial ekonomi keluarga

nelayan ABK ; (e) pengaruh sistem bagi hasil terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan cakalang utamanya dalam pemanfaatan hasil pendapatannya.

4. Kesulitan yang dihadapi selama penelitian

Ketika melakukan penelitian, penulis menemui kesulitan dalam mengobservasi dan melakukan wawancara dengan *Plasma* yang menjadi pemilik kapal, karena *Plasma* tersebut berada di Flores Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu penulis hanya dapat mencari data tentang *Plasma* dari wawancara dengan pengelola kapal. Dalam hal ini, Pengelola merupakan orang yang diserahi tugas oleh *Plasma* untuk mengelola kapal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mensistematiskan pembahasan laporan penelitian ini maka penulis mencoba mengorganisasikan tulisan ini merujuk kepada sistematika penulisan skripsi yang berlaku secara umum, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan berisikan uraian berkenaan dengan alasan memilih judul, batasan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka berisikan studi-studi tentang masyarakat nelayan, karakteristik sosial budaya nelayan, organisasi

kerjasama nelayan, sistem bagi hasil, sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Bab III : Gambaran umum lokasi penelitian. Dalam bagian ini secara umum digambarkan letak geografis dan keadaan alam, keadaan penduduk atau demografi, mata pencaharian, serta sistem kepercayaan penduduk kelurahan Bone-Bone .

Bab IV : Dalam bab ini dipaparkan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai (a) gambaran tentang aktivitas sehari-hari nelayan cakalang ; (b) tipe/kategori kelompok usaha nelayan cakalang dan struktur organisasinya ; (c) Sistem bagi hasil nelayan cakalang ; (d) Pranata-pranata informal dalam unit usaha yang memberi jaminan sosial ekonomi keluarga nelayan ABK ; (e) pengaruh sistem bagi hasil terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan cakalang utamanya dalam pemanfaatan hasil pendapatannya.

Bab V : Berisi kesimpulan serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Nelayan

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari sebaran pulau-pulau menunjukkan bahwa dalam setiap daratan yang menimbuni lautan terdapat masyarakat maritim didalamnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa laut berperan sebagai mata pencaharian hidup bagi penduduknya utamanya yang bermukim disekitar daerah pantai.

Apabila kita membatasi defenisi umum tentang masyarakat, Linton yang dikutip oleh Mattulada mendefinisikan bahwa, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan sadar, bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas (Mattulada:1977:15). Demikian halnya dengan masyarakat yang ada di pesisir dan pulau-pulau lain yang mengembangkan kesadaran akan kelompok-kelompok dan lingkungan alam yang ada disekelilingnya. Hal ini meliputi sikap dan pandangan masyarakat tersebut dalam mempertahankan hidupnya.

Defenisi mengenai masyarakat itu lebih dibatasi lagi tentang masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang sangat spesifik yaitu kebudayaan masyarakat nelayan. Kebudayaan nelayan erat kaitannya dengan suatu orientasi terhadap laut. Suatu orientasi meliputi sikap maupun

pengetahuan aktual (Nishimura;1973:6). Dapatlah dikatakan bahwa masyarakat yang mempunyai orientasi untuk mempertahankan hidup pada sumber daya laut, dengan tujuh unsur kebudayaan yang dimiliki, atau kesadaran akan kondisi lingkungan, sosial, budaya, adalah tipe-tipe/karakter budaya masyarakat nelayan.

Dalam evolusi mata pencaharian hidup manusia, menangkap ikan merupakan pekerjaan penting bagi suku-suku bangsa yang bermukim dekat pantai (Koentjaraningrat,1982:11), meskipun mereka menggunakan alat-alat penangkap yang sangat sederhana seperti tombak. Hal itu diungkapkan juga oleh Matutulada (1977) bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di pantai-pantai mengembangkan kemampuan menangkap ikan, mencari tiram-tiram dan sebagainya. Mereka mengembangkan teknik-teknik alat pencaharian makanan, menemukan alat-alat pengangkut di air mulai dari batang-batang kayu rakit dan kesampan baik yang terbuat dari kayu maupun dari batangan-batangan kayu. Dalam perkembangannya dalam arti perkembangan teknologi alat tangkap, yang meskipun tidak ditemukan fakta-fakta empiris mengenai proses perkembangan teknologi itu (Koentjaraningrat, 1982:33) mengatakan bahwa mata pencaharian nelayan lebih banyak tergantung pada perkembangan teknologi.

Dalam dasa satu warsa ini banyak dilakukan penelitian-penelitian mengenai kebudayaan masyarakat nelayan para ilmuan-ilmuan yang tertarik dalam masalah ini memberikan input atau sumbangan-sumbangan berupa

tulisan-tulisan mengenai kondisi, karakter-karakter ataupun sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Nishimura (1973) banyak mencakup mengenai perbedaan-perbedaan kehidupan para nelayan di seluruh pelosok dunia, baik metode yang digunakan, sistem kepemilikan, sampai kepada ruang lingkup ilmu-ilmu yang tercakup didalamnya.

Perhatian pada masyarakat nelayan, nampaknya juga menjadi suatu kajian menarik bagi kaum akademis Indonesia. hal ini didasarkan atas fakta-fakta yang ditemukan dari beberapa laporan penelitian mengenai masyarakat nelayan, juga mempunyai tuntutan kebutuhan konsumtif yang semakin meningkat, dimana kedua tuntutan tersebut tidak dapat dijalankan secara bersama-sama oleh nelayan.

Sehingga dapat dipahami bahwa di antara bagian masyarakat adalah komunitas. Disebut pula bahwa masyarakat setempat atau komunitas menunjuk pada masyarakat yang bertempat tinggal disuatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya (Soekanto, 2002 : 168).

Umumnya penduduk yang bermukim di pesisir pantai sebagian besar telah memilih jalan hidup mereka sebagai nelayan. Dengan demikian, mata pencaharian utamanya cenderung amat tergantung pada laut. Menurut Suyono (dalam kamus antropologi, 1985:272), mengemukakan bahwa yang

dimaksud sebagai nelayan adalah orang yang hidup dari usaha menangkap ikan sebagai mata pencaharian pokok.

Lampe berpendapat (1995:29) bahwa masyarakat nelayan adalah mereka yang mempunyai mata pencaharian hidup dengan memanfaatkan sumber daya laut seperti ikan dan biotik laut lainnya, yang mengandung nilai ekonomis (dapat dikonsumsi dan dipasarkan), baik secara terus menerus maupun secara musiman, dengan menggunakan sarana seperti perahu dan alat-alat penangkapan. Dalam undang-undang perikanan (dalam Suryani :1997) juga mengemukakan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada sumber daya laut sering pula disebut sebagai masyarakat bahari. Menurut lampe (2004), masyarakat bahari merupakan kesatuan-kesatuan hidup manusia berupa kelompok-kelompok kerja, kampung, desa, suku bangsa (ethnic group), komuniti-komuniti, kesatuan-kesatuan administratif berupa kecamatan, propinsi, bahkan bisa merupakan negara atau kerajaan, yang sebagian besar atau sepenuhnya menggantungkan kehidupannya secara langsung atau tidak langsung pada pemanfaatan sumberdaya hayati atau non hayati laut serta jasa-jasa laut yang dipedomani oleh dan dicirikan bersama dengan kebudayaan baharinya.

Definisi nelayan menurut Muchlis (1984), diartikan sebagai orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan baik di laut, selat, teluk

atau danau maupun sungai dengan menggunakan perahu atau kapal dan berburu atau menggunakan perangkap. Mereka adalah orang-orang yang gigih dan akrab dengan kehidupan laut yang sifatnya keras. Pengetahuan tradisionalnya tentang ekologi kelautan merupakan bagian dari kehidupan mereka yang sifatnya turun-temurun, para nelayan sangat percaya betapapun kuatnya tantangan itu, laut tetap menawarkan berbagai kemungkinan serta memberikan peluang dalam mencari nafkah untuk memperolehnya mereka harus berjuang dan perlu keyakinan, keuletan dan teknologi sendiri.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah mencari dan menangkap ikan dan jenis-jenis biota laut lainnya yang bernilai ekonomi dengan menggunakan alat bantu dan mempunyai pengetahuan tentang laut.

B. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Nelayan

Setiap kelompok masyarakat mempunyai ciri yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain. Hal ini berkenaan dengan hadimya aspek-aspek sosio kultural yang berbeda pula.

Jika dilihat dari karakteristiknya maka masyarakat nelayan adalah suatu komunitas yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan komunitas lain seperti petani atau pedagang, perbedaan ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang mengakar dan dianut masyarakatnya. Sementara dari segi

ekonomi mereka sangat menggantungkan pendapatan kepada sumberdaya kelautan.

Selanjutnya, Lampe (2004:7) mengatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat lima karakteristik menyolok sebagai ciri sosial masyarakat bahari, yaitu :

(1) Ketergantungan dan keterkaitannya secara fisik dan emosional yang ketat pada lingkungan alamnya; (2) kebutuhan pada dan keterkaitan secara mutlak kepada kelembagaan lokal; (3) ketergantungan secara mutlak kepada pasar (lokal, regional, global); (4) keterlibatan pihak-pihak lain secara berkelompok atau individual dalam aktifitas dan usaha-usaha nelayan; (5) konflik sosial antar kelompok-kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya antar kelompok-kelompok nelayan dari berbagai kesatuan etnis, dan yang melibatkan pemerintah dan berbagai instansi terkait mulai dari tingkat desa, kecamatan, propinsi, bahkan antar negara

Sedangkan menurut Kusumastanto (2003:56) beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan yaitu:

(1). Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi sangat tergantung pada kondisi ekosistem dan lingkungan yang rentan terhadap kerusakan, khususnya pencemaran dan degradasi kualitas lingkungan; (2). Persoalan yang paling mencolok pada kelompok masyarakat ini khususnya nelayan adalah ketergantungan pada musim, ketergantungan pada musim ini sangat besar, khususnya pada nelayan kecil. Pada musim penangkapan, mereka sangat sibuk sementara pada musim paceklik mereka mencari kegiatan ekonomi lain atau nenganggur. Secara umum pendapatan masyarakat nelayan sangat fluktuatif, kondisi ini tercermin juga dari pola hidup masyarakat nelayan, pada musim panen mereka cenderung bersifat konsumtif atau berfoya-foya dan sebaliknya pada musim paceklik mereka terlibat banyak utang pada rentenir atau tengkulak; (3). Kelompok masyarakat nelayan sangat tergantung pada pasar. Hal ini dikarenakan komoditas yang

dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau akan membusuk sebelum laku dijual.

Carnea (1988) berpendapat bahwa didalam komunitas nelayan dikenal dua kelompok yaitu masyarakat pembudidaya ikan, seperti petambak dan masyarakat penangkap ikan dilaut. Walaupun kedua kelompok ini sama-sama menghasilkan ikan, namun pola kerjanya berbeda. Dalam pembudidaya ikan biasanya seseorang memperbaiki daerah tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ikan dan memperoleh hak atas ikan, sedangkan untuk kategori penangkap ikan dilaut campur tangan terhadap perkembangbiakan ikan sangat kecil.

Selanjutnya Pollanc yang dikutip oleh Carnea, membagi nelayan yang menangkap ikan dilaut atas dua kelompok yaitu perikanan berskala besar dan berskala kecil. Perikanan berskala besar diorganisasikan melalui cara yang serupa dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju yang relatif padat modal, sedangkan perikanan berskala kecil umumnya bertumpang tindih dengan dengan kegiatan lain, seperti pertanian, peternakan, budidaya ikan dan biasanya padat karya, dan sesedikit mungkin menggunakan tenaga mesin, walaupun mungkin menggunakan perahu motor, umumnya tidak menggunakan mesin, mereka tetap menggunakan teknologi primitif untuk penanganan dan pengolahan (beberapa diantaranya menggunakan es fasilitas kamar pendingin) akibatnya kerugian panen begitu berarti (Carnea:1988).

Mubyarto dkk (1984) dalam penelitiannya di Jepara membagi status pekerjaan nelayan dalam berbagai kategori yaitu:

1). nelayan kaya dimiliki oleh seorang pemilik kapal (juragan), dan mempekerjakan nelayan-nelayan lain sebagai pandega tanpa ia harus ikut bekerja, 2). Nelayan kaya yang dimiliki oleh seorang juragan dimana ia masih ikut bekerja sebagai awak kapal, 4). Nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan dan memiliki perahu tanpa mempekerjakan orang dari luar keluarganya, 4). Nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga harus ditambah dengan bekerja lain (sampingan) baik untuk ia sendiri atau untuk istri dan anaknya, 5). Nelayan pandega atau tukang kiteng yang tidak mempunyai perahu sehingga kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan bekerja sebagai awak kapal.

C. Organisasi Kerjasama Nelayan

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan juga memiliki kelompok-kelompok sosial. Masyarakat nelayan, khususnya di Sulawesi Selatan terdapat suatu kelompok sosial organisasi kerja *punggawa-sawi* yang selalu berdampingan dan bekerjasama sebagai suatu unit kerja produksi untuk memperoleh sumber daya perikanan.

Punggawa-sawi merupakan kelompok usaha/unit kerja nelayan Bugis, Makassar, Bajo dan Mandar di Sulawesi Selatan yang telah dipertahankan sejak ratusan tahun. Seperti yang dikatakan oleh Pelras bahwa hubungan *punggawa-sawi* pada masyarakat Sulawesi Selatan adalah bentuk perwujudan pola hubungan patron-klien dalam bidang ekonomi. Pada semua bidang usaha rakyat, mulai dari pertanian, sawah, perikanan, pelayaran, pertambangan, sampai pertukangan; Organisasi produksi berjalan dalam



kerangka hubungan antara seorang *punggawa* dengan *para sawinya* (Pelras:1996).

Istilah *punggawa* berlaku untuk semua pemimpin, atau orang yang diikuti (*tonipinawang*) atau bos dalam istilah sekarang dalam masing-masing bidang usaha, dimana pemimpin itu adalah pemilik modal utama dalam usaha yang bersangkutan. Istilah *sawi* berlaku untuk semua orang berstatus dipimpin atau orang yang menjadi pengikut (*tominawang*) pada *punggawa*.

Hubungan *punggawa-sawi* dalam organisasi produksi nelayan dapat dikategorikan sebagai pola hubungan *patron-klien*. Hal demikian dikatakan oleh James E. Scott yang dikutip oleh Muchlis dan Robinson, bahwa suatu kasus khusus hubungan antara dua orang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seorang yang lebih tinggi kedudukan sosial, ekonominya (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (*klien*) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada *patron* (Muchlis dan Robinson:1984).

Abu Hamid (1982:35) menyebutkan bahwa, tata hubungan *punggawa-sawi* bertolak pada tradisi yang ada atas dasar hubungan sosial ekonomi, yang menjelma melalui hutang budi. Dengan sistem tradisi ini menurutnya mempunyai peranan dalam pelestarian kehidupan nelayan, oleh karena itu

sawi memandang *punggawa* sebagai penyelamat, perlindungan dan pemimpin yang mengayomi kehidupan mereka, dan dengan demikian nampak adanya sistem *patron-klien*.

Pola *patron-klien* hubungan *punggawa-sawi* dalam kelompok kerja nelayan dapat dilihat sebagai perluasan hubungan kerja kedalam hubungan sosial sehari-hari kedekatan hubungan yang tercipta melalui interaksi dalam organisasi produksi menjadikan *sawi* tidak sungkan meminta bantuan dari *punggawa* bila terdesak oleh kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kedudukan ekonomi yang lebih tinggi, *punggawa* memiliki kemampuan memberikan bantuan-bantuan tersebut. Bantuan itu terutama dibutuhkan oleh *sawi* dan pemenuhan kebutuhan subsisten pada kondisi tertentu (misalnya persediaan keuangan sudah habis dan musim angin) kebutuhan biaya saat melahirkan, pesta perkawinan atau upacara selamatan. Hal ini yang paling umum dijumpai pada keluarga *sawi*.

Selanjutnya Firth yang dikutip oleh Soekanto mengemukakan beberapa prasyarat yang merupakan unsur pembentuk organisasi sosial:

1. Harus ada ukuran yang tetap dalam pengaturan yang tetap pada pengaturan tata hubungan yang diterima oleh para anggota kelompok sebagai pola kebersamaan.
2. Harus ada kekuasaan yang sifatnya memaksa dalam melaksanakan tata hubungan
3. Harus ada pengaturan dan penyesuaian individu yang menunjukkan adanya koordiansi (perumusan itu berupa status dan peran)
4. Harus ada anggota yang hidup dalam berbagai bidang dan menjalin kerukunan hidup
5. Harus ada standar perilaku yang dipolakan.

(Soekanto:2002:44).

Di dalam organisasi sosial ada prinsip-prinsip umum yang berlaku yaitu organisasi sosial dapat dilihat baik secara struktur maupun secara proses. Organisasi sosial sebagai struktur menitik beratkan perhatian pada tata hubungan yang terdapat didalam organisasi sosial misalnya tata hubungan berdasarkan keturunan yang menentukan posisi/status dalam tata hubungan organisasi tersebut. Sedangkan organisasi sosial sebagai proses terletak pada kegiatan sehingga dapat diamati perilaku-perilaku dari tiap anggota organisasi.

Meskipun laut menyediakan sumber ekonomi yang potensial bagi kelangsungan hidup manusia, seperti ikan dan biotik laut lainnya yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dikonsumsi atau dipertukarkan), namun pekerjaan untuk memperolehnya berlangsung dalam suatu lingkungan yang berbahaya dan penuh ketidak menentuan. Acheson (1981) mengemukakan bahwa masalah-masalah umum yang biasa dihadapi oleh nelayan yaitu :

1. Laut penuh resiko dan ketidak menentuan,
Acheson menggambarkan laut sebagai suatu lingkungan yang sulit dimasuki orang untuk survival karena penuh dengan pukulan badai dan ombak yang tidak henti-hentinya.
2. Adanya berbagai jenis dan pola kebiasaan ikan dan biotik lainnya.
Laut dengan berbagai macam kadar air dan keadaan dasarnya mengandung banyak jenis biotik , tetapi yang bukan hanya ada secara musiman karena mempunyai pola dasar migrasi, tetapi ada juga populasi-populasi ikan yang meningkat atau merosot secara tiba-tiba yang sulit diramalkan oleh nelayan. Hal menyebabkan nelayan sulit mengontrol binatang buruannya dilaut.

3. Lingkungan laut yang tampaknya homogen tetapi sebetulnya bersifat mendua.
Salah satu sifatnya yang mempersulit moperasi nelayan adalah seluruh bagian permukaan tampak sama saja. Sifat mendua laut seperti ada air laut yang kadar garamnya tinggi dan ada yang tawar, ada yang dasarnya rata dan ada yang berbatu-batu. Hal ini menyebabkan para nelayan tidak dapat mengetahui keadaan meningkat atau merosotnya populasi dari jenis ikan tertentu disuatu lokasi dan dapat juga menimbulkan kerusakan alat penangkapan.
4. Sumber ikan dan biotik laut lainnya merupakan milik kekayaan bersama masyarakat nelayan disekitarnya.
Sifat laut yang demikian menimbulkan persaingan dan pertentangan diantara para kelompok nelayan dalam memperebutkan sumber. Hal ini menjurus pada pengrusakan sumber ikan dan kerusakan ekologi disuatu perikanan tertentu.
5. Hasil produksi ikan yang cepat membusuk.
Hal ini terjadi pada masyarakat nelayan yang belum menggunakan teknik pengawetan modern. Kondisi tangkap ikan yang demikian menyebabkan kualitas komoditas seringkali menurun dan pemasarannya tidak dapat di tunda-tunda.
6. Harga ikan dipasaran yang sifatnya turun naik.
Meskipun tangkapan nelayan secara berturut turut baik, tidaklah selamanya berarti bahwa pendapatan mereka juga demikian, melainkan justru sebaliknya. Hal disebabkan faktor naik turunnya harga pasaran, dan karena para nelayan tidak selamanya tahu informasi tentang pasar yang dikuasai para pedagang dan tengkulak.
7. Ketidakmampuan nelayan dalam menghadapi eksploitasi para pedagang atau tengkulak dan pemilik kapal atau perahu.
Nelayan dimana-mana di dunia menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, sehingga mereka tidak melibatkan diri dalam situasi yang sifatnya politis. Sehingga mereka banyak bergantung pada para pedagang dan pemilik kapal yang sering mengeksploitasi mereka.
8. Masalah-masalah psikologis dan penyimpangan budaya.
Suatu fakta bahwa pekerjaan menangkap ikan di laut menyebabkan kaum laki-laki (nelayan) terpisah secara fisik dari keluarga mereka. Keterpisahan dalam jangka waktu yang lama menimbulkan masalah psikologis dan penyimpangan

budaya diantara kedua belah pihak. Masalah psikologis yang timbul berupa gejala kesepian atau perasaan was-was akan nasib masing-masing. Sedangkan penyimpangan budaya berupa penyimpangan peranan.

Dalam menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi lingkungannya, masyarakat nelayan di dunia menggunakan berbagai macam respon yang dapat dipandang sebagai strategi adaptif.

Diantara masyarakat nelayan dimana-mana, menurut E. Smith yang dikutip oleh Lampe, ada persepsi budaya yang kuat bahwa kerja nelayan di laut penuh dengan resiko yang mengancam keselamatan jiwa manusia dan alat-alat yang digunakan (Lampe:1995). Dengan persepsi budaya seperti ini, pola kerja nelayan pada umumnya dijalankan dengan kerjasama. Dalam pengerahan anggota kerjasama diadakan secara selektif menurut kondisi fisik. Dengan demikian timbul polarisasi kerjasama menurut jenis kelamin yang lebih tajam pada masyarakat nelayan bila dibandingkan dengan masyarakat tani atau industri, dimana kaum laki-laki (yang dianggap kuat fisiknya) kelaut, sedangkan pada umumnya kaum wanita (yang dianggap lemah fisiknya) tinggal mengurus rumah tangga atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya, misalnya memproses atau berdagang ikan.

Sementara menurut Noor dan Noor yang dikutip oleh Lampe, bahwa yang menyebabkan kerjasama dalam perikanan nelayan adalah kombinasi dari kedua faktor ekologi dan sifat dari teknologi yang digunakan misalnya

karena alat-alat penangkapan yang digunakan berat dan rumit (Lampe:1995:14).

Kemudian, Lampe (dalam Buletin Antropologi:1995) Mengatakan, seleksi perekrutan anggota-anggota kerjasama nelayan berbeda-beda setiap kebudayaan. Ada kelompok-kelompok kerjasama nelayan yang terdiri dari orang-orang sekerabat, ada kelompok-kelompok kerjasama nelayan yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang berteman atau sekampung/sedesa.

Menurut Kusnadi (2002), struktur kelompok perikanan nelayan berdasarkan pada tingkat penguasaan/kepemilikan alat-alat produksi atau perlalatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), sehingga terbagi kedalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam melakukan kegiatan produksi nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya.

Hasil penelitian Mintaroem dkk (2005) mengatakan, kehidupan para nelayan di Desa Bandaran berkelompok. Setiap kelompok nelayan terdiri dari: (1) *juragan* pemilik kapal/perahu; (2) *juragan* kepala perahu; (3) *pandhiga*. Sebagai sebuah (organisasi) kelompok nelayan pola relasi kerja, baik antara juragan perahu, *juragan* kepala dan *phandiga*, atau antar anggota nelayan sendiri, bukan terjadi dalam kerangka hubungan kerja antara "atasan" dan "bawahan" yang bersifat "hubungan pengabdian", tetapi lebih bersifat "kolegialisme" dan "kekeluargaan", sekalipun terdapat klasifikasi di

antara mereka sesuai dengan spesifikasi kerja masing-masing. Hubungan di antara mereka pun sangat longgar, terbuka, suka-hati dan didasarkan atas "kesertaan secara sukarela", tetapi dalam kasus-kasus tertentu bahkan seorang juragan pemilik perahu harus merekrut anggota nelayannya dengan "cara membeli". Hal ini menunjukkan betapa faktor-faktor sosial dan budaya bercampur baur dengan faktor-faktor ekonomi. Sistem atau pola rekrutmen keanggotaan nelayan dilakukan secara: (1) sukarela; dan (2) membeli. Cara sukarela, adalah perekrutan seseorang dalam sebuah kelompok nelayan yang terbuka bagi siapa saja, atas dasar kesukarelaan yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok nelayan. Di lain pihak, sistem "membeli" (*melle*) adalah perekrutan seseorang dalam sebuah kelompok nelayan dengan cara membeli atau membayar agar yang bersangkutan mau menjadi anggota kelompok perahunya.

Sistem membeli ini dilakukan manakala sebuah kapal/perahu tersebut pada setiap hari atau setiap musim melaut dapat dikatakan sedikit atau sama sekali tidak membawa hasil tangkapan ikan yang banyak (*ta' olleyan*), atau kurang memadai, sehingga, untuk mendapatkan anggota, seorang juragan harus membeli orang-orang yang akan dijadikan anggota *pandhiga* perahunya.

Resusun yang dikutip oleh Suryani mengemukakan pendapat tentang organisasi nelayan di pulau Sembilan, bahwa nelayan-nelayan yang berada

di Pulau Sembilan telah terorganisasi dalam kelompok-kelompok *punggawa-sawi* yang bersifat fungsional, yang dikendalikan oleh *punggawa*. Hubungan kerja antara *punggawa* dan *sawi* itulah yang membentuk sistem sosial nelayan, yang melibatkan warga dan kelompok-kelompoknya, sehingga statusnya juga lebih tinggi (Suryani:1997). Berdasarkan sistem status itu, dalam suatu kelompok penangkapan status nelayan bisa dibagi dua yakni : nelayan *juragan* dan nelayan *sawi*, dimana *juragan* hanya ada satu orang dalam satu kelompok, sedangkan *sawi* bisa sampai 8-10 orang.

D. Sistem Bagi Hasil

Menurut Acheson (1981) mengemukakan sistem bagi hasil merupakan aturan yang paling banyak ditemukan baik dalam perikanan-perikanan tradisional berskala kecil maupun dalam perikanan-perikanan modern. Secara umum sistem bagi hasil menetapkan aturan, bahwa setiap anggota memperoleh satu bagian pendapatan dari jumlah keseluruhan pendapatan perhari, perminggu atau perbulannya. Dalam perikanan-perikanan yang teknologi penangkapannya sudah modern umumnya, pembagian pendapatan diadakan setelah dikeluarkan biaya-biaya untuk perbaikan alat-alat penangkapan yang rusak, bahan bakar, oli, perawatan mesin dan makanan. Besar bagian anggota tidak tetap, melainkan berdasarkan jumlah atau hasil penangkapan ikan dan turun naiknya harga ikan di pasar. Setiap anggota mendapatkan bagian yang relatif sama. Pembagian pendapatan dalam

sistem bagi hasil menunjukkan suatu fungsi kerja, hal ini tampak dalam istilah-istilah yang digunakan, seperti *bagiannya si A*, *bagiannya net* (*biasanya 3 bagian*), *bagiannya perahu* (*biasanay 2 bagian*), *bagiannya motor* (*biasanya 3 bagian*), dan lain-lain. Hal yang jarang digunakan adalah *bagiannya si pemilik* yang diperuntukkan pada alat-alat produksi, meskipun sebetulnya itu buat si pemilik juga.

Hal yang umum pula bahwa si pemilik juga mendapat satu bagian yang sama dengan bagian-bagian nelayan biasa, tetapi itu bukan bagiannya sebagai pemilik, melainkan sebagai anggota biasa karena dia ikut aktif ke laut.

Hasil penelitian Bagong Suyanto yang dikutip oleh Saad, di Pantai Utara Jawa menunjukkan rata-rata pendapatan nelayan pukat (nelayan berstatus anak buah/*pandega*) setelah mengadopsi teknologi modern adalah sekitar Rp 200.000,- sampai Rp 300.000,-/bulan. Beberapa *juragan* kapal yang merangkap sebagai pedagang ikan mengaku berpenghasilan sampai Rp. 1.000.000,-/bulan. Sementara itu, penghasilan nelayan tradisional rata-rata hanya antara Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,-/perbulan pada musim ramai ikan. Sedangkan pada musim sepi ikan pendapatan mereka di bawah Rp 50.000,-/bulan. Ketimpangan pendapatan lebih menyolok terjadi antara pihak pemilik alat-alat produksi dan *juragan* (nahkoda) dengan lapisan anak buah di Wonokerto (Semedi, 2001:128-208). Ini ditunjukkan dengan sebuah kasus bagi hasil dari pendapatan bersih sebesar Rp 30.000.000,-, di mana

Rp 12.000.000,- untuk pemilik dan Rp 18.000.000,- dibagi antara *juragan* dan *pandega*. Setiap *pandega* hanya memperoleh Rp. 300.000,- dan *juragan* memperoleh sekitar tiga kali lipat dari yang diperoleh *pandega* (Rp. 900.000,-) ditambah dengan bonus, ekstra bonus dan super bonus dari pemilik sebesar Rp 3.000.000,-, jadi semuanya berjumlah Rp. 3.900.000,- (Saad:2000:4).

Pada penelitian Mintaroem dkk (2005) mengemukakan bahwa, dalam masyarakat nelayan desa Bandaran, dikenal dua sistem pembagian hasil ikan tangkapan yang didasarkan pada "jenis perahu yang digunakan" dan "jaring (alat penangkapan ikan) yang digunakan", yaitu apakah menggunakan jenis kapal/perahu besar (*sleret* dan *pakesan* besar); atau jenis kapal kecil (*sampan/edher* dan *pakesan* kecil) juga apakah menggunakan alat berupa jaring atau pancing (khusus untuk jenis kapal kecil). Untuk jenis perahu besar, sistem pembagian ikannya adalah 50% dari seluruh ikan hasil tangkapan adalah bagian pemilik perahu, sedangkan 50% sisanya untuk seluruh awak perahu. Namun, sejalan dengan semakin ketatnya persaingan di antara para *juragan* pemilik perahu, dewasa ini pemilik perahu hanya mendapat sekitar 1/3 bagian (atau 35%); sedangkan sekitar 2/3 (65%) bagian lainnya dibagi menjadi 20 bagian untuk seluruh awak kapal/perahu.

Apabila diperhatikan, dalam sistem pembagian ikan hasil tangkapan di atas, tampaknya *juragan* pemilik perahu umumnya tetap mendapatkan pembagian hasil ikan rata-rata lebih tinggi dari para awak kapal. Seperti pada sistem pembagian ikan pada jenis kapal *sleret* di atas, besarnya jumlah

penerimaan dari seorang juragan pemilik perahu pakesan kecil dan sampan (edher) tersebut, memang sebanding dengan investasi yang telah dia keluarkan untuk pengadaan perahu, jaring, dan mesin. Selain itu, karena dalam hal terjadi kecelakaan atau kerusakan pada perahu, jaring, dan mesin, maka seluruh biaya perawatan, perbaikan atau bahkan penggantinya yang baru sepenuhnya menjadi tanggungan dan atas modal dari juragan pemilik perahu tersebut.

Hal ini berbeda pada kapal besar jenis sleret dan pakesan besar yang seluruh biaya perawatan, perbaikan dan/atau penggantian yang baru diambilkan dari uang perbaikan/perawatan, yaitu sebesar 5% - 10% (sistem pembagian lama), atau sebesar 2.14% (sistem pembagian baru). Sementara itu, untuk jenis perahu kecil terbagi lagi menjadi dua sistem. Apabila menggunakan jaring *sethet*, maka sistem pembagiannya adalah 4-5 bagian untuk *juragan* pemilik perahu, sedangkan awak perahu masing-masing mendapatkan 1 bagian (jumlah awak perahu antara 4-6 orang), tokang *nampo* dan tokang *jagha'an* mendapatkan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, tokang *koras* (harfiah: "tukang mengurus" air di dalam perahu di tengah laut ketika sedang melaut) tidak mendapatkan bagian tersendiri, tetapi memperoleh bagian dari hasil pemberian sekadarnya (*sakadharra*) atau atas dasar kerelaan dari para nelayan. Namun, apabila menggunakan jaring gondrong pembagiannya adalah: (1) *juragan* pemilik perahu antara 10% - 40%, tetapi oleh karena dia juga dapat merangkap sebagai tukang *nampo*, maka selain

mendapatkan bagian yang telah ditetapkan di atas, juga masih memperoleh tambahan bagian lagi antara 5% - 20%, sehingga secara keseluruhan mendapatkan perolehan sebanyak 15% - 60%; (2) awak perahu mendapatkan bagian yang bervariasi, tergantung apakah jaringnya memperoleh hasil banyak, sedikit atau tidak. Namun, secara umum mereka dapat memperoleh total bagian bersih sebanyak 85% dari jumlah udang hasil pancingan mereka; (3) *tokang nampo* mendapatkan bagian yang diberikan oleh masing-masing anggota nelayan sebanyak 5%. Karena seluruh anggota nelayan berjumlah 1-4 orang, maka total bersih penerimaannya sebanyak 5% - 20%.

Sistem bagi hasil dengan istilah-istilah bagian yang fungsional itu menunjukkan secara logis bahwa semua anggota awak kapal merupakan orang-orang yang bekerja sama, yang berhak mendapatkan hasil atau nilai kerjanya masing-masing (Acheson dikutip oleh Munsir, 1992)

E. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan

Kata sosial mempunyai beberapa pengertian dan digunakan secara luas. Menurut Conyers (1981), dalam Perencanaan Sosial di Dunia ketiga, pengertian sosial dikelompokkan kedalam 4 kategori, pertama ; kata sosial mengandung pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari dan dihubungkan dengan pengertian hiburan atau sesuatu yang menyenangkan, misalnya kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan jaminan sosial. Kedua ;

istilah digunakan sebagai wadah individual, yang mempunyai kecenderungan kearah pengertian orang yang berkonotasi masyarakat (*society*) dan warga (*community*). Implikasinya adalah bahwa suatu kelompok bukanlah sekedar penjumlahan individu sehingga apa yang dirasa baik bagi individu, belum tentu baik bagi kelompok secara keseluruhan. Ketiga ; kata sosial digunakan juga dalam pengertian yang lebih umum yang melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda. Dalam istilah sehari-hari misalnya orang berjiwa sosial, diartikan sebagai orang yang senang berada dalam suatu kelompok masyarakat dan 'hubungan sosial' atau interaksi. Keempat ; kata sosial dapat lebih membantu kita dalam memahami pengertian perencanaan sosial dengan menggunakan pengertian sosial sebagai lawan kata ekonomi, misalnya pembangunan sosial adalah berlawanan dengan pembangunan ekonomi dan keuntungan masyarakat (*social benefit*), suatu proyek bisa dibandingkan dengan keuntungan ekonominya.

Dalam arti sempit istilah ekonomi berkaitan dengan uang, produksi dan out put fisik, sedangkan sosial menyarankan sesuatu yang non moneter sifatnya atau sesuatu yang tidak menunjang secara langsung kepada produksi, tetapi sesuatu yang khusus berkenaan dengan kualitas kehidupan manusia pada umumnya.

Dari penjelasan tersebut diatas, para pakar memberikan pengertian yang berbeda dan berdasarkan pada simbol-simbol tertentu tentang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat.

Soekanto (2002), menekankan bahwa kedudukan diartikan sebagai keberadaan seseorang dalam suatu kehidupan sosial. Kedudukan sosial berarti tempat seseorang secara umum dalam masyarakat dihubungkan dengan orang lain dalam konteks lingkungan dan pergaulannya, prestasinya, hak-hak serta kewajibannya. Ia membagi masyarakat dalam dua kedudukan. Pertama, *Ascribed-status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa melihat perbedaan rohaniah dan kemampuannya, status ini diperoleh dari keturunannya. Kedua, *acheaved-status* yakni kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Status ini diperoleh berdasarkan pendidikan, ketrampilan dan kemampuannya.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa status sosial ekonomi masyarakat berarti kedudukan atau strata yang diperoleh seseorang dalam kehidupan sosialnya, biasanya diukur dan dihubungkan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kepemilikan aset.

Adapun Konsep "miskin" secara umum mengacu kepada orang yang kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi secara memadai. Mengenai pengertian "keluarga miskin atau keluarga fakir miskin" salah satu pengertian yang dapat kita kemukakan di sini adalah bersumber dari Departemen Sosial RI (1999) bahwa "keluarga fakir miskin" adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan

pokok bagi kemanusiaan. Sajogyo (dikutip dari Said Rusli, dkk, 1995:6) menggunakan kriteria tingkat pengeluaran sebagai produksi terhadap pendapatan setara beras sebagai dasar penetapan garis kemiskinan yaitu 480 kg per kapita per tahun untuk wilayah perkotaan. Diuraikan pula oleh Suparlan bahwa :

"Kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau kelompok orang. Akibat dari kekurangan harta atau benda berharga tersebut maka seseorang atau kelompok orang tersebut kurang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya. Kekurangan tersebut mungkin hanya pada tingkat kebutuhan-kebutuhan budaya (adab, upacara-upacara, moral dan etika), atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial (berkomunikasi dengan sesamanya, pendidikan, pamer), atau bahkan pada tingkat kebutuhan yang mendasar (makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal atau rumah, kesehatan dsb)".
(Suparlan, 1994)

Adalah merupakan suatu ironi bagi sebuah negara maritim seperti Indonesia bahwa masyarakat nelayan merupakan golongan masyarakat yang paling miskin. Walau data agregatif dan kuantitatif yang terpercaya tidak mudah diperoleh, pengamatan visual/langsung ke kampung-kampung nelayan dapat memberikan gambaran yang jauh lebih gamblang tentang kemiskinan nelayan di tengah kekayaan laut yang begitu besar.

Pemandangan yang sering kita jumpai di perkampungan nelayan adalah lingkungan hidup yang kumuh serta rumah-rumah yang sangat sederhana. Kalaupun ada beberapa rumah yang menonjolkan tanda-tanda kemakmuran (misalnya rumah yang megah dan berantena parabola), rumah-

rumah tersebut umumnya dipunyai oleh pemilik kapal, pemodal, atau rentenir yang jumlahnya tidak signifikan dan sumbangannya kepada kesejahteraan komunitas sangat tergantung pada individu yang bersangkutan.

Di samping itu, karena lokasi geografisnya yang banyak berada di muara sungai, lingkungan nelayan sering kali juga sudah sangat terpolusi. Lebih dari itu, aspirasi politisnya pun acap kali terabaikan. Dalam kondisi yang secara multidimensi demikian miskin, akan sangat sulit bagi para nelayan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan begitu saja bersaing dalam pemanfaatan hasil laut di era keterbukan sekarang ini. Mereka akan selalu kalah bersaing dengan perusahaan penangkapan ikan, baik dengan nelayan negara asing maupun nasional, yang berperalatan modern. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas nelayan merupakan langkah yang sangat krusial dalam mencapai tujuan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia.

Sebagai contoh, Dani mengungkapkan bahwa, Di Kab. Sukabumi, tercatat ±16.000 keluarga nelayan tradisional yang tersebar di Pelabuhan ratu, Ciselok, Cibangban, Ujunggenteng, Minajaya, Ciwaru, hingga berbatasan dengan Cianjur selatan. Dari jumlah yang tercatat di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pelabuhan ratu, seperti yang disampaikan ketuanya, Suhendi, sekira 95% adalah nelayan miskin. Sisanya adalah para *taweu* atau juragan pemilik perahu yang tentu saja hidupnya lumayan sejahtera. Kehidupan nelayan memang tak ubahnya seperti perahu congkrenge atau beleketek, yaitu perahu kecil yang memanfaatkan dayung

atau mesin diesel hingga 7 PK. Dua jenis perahu itu tidak pernah terlihat baik. Selalu saja ada kebocoran di sana-sini dan memang bentuknya sangat sederhana. Begitu pun kehidupan belasan ribu nelayan tradisional di Kab. Sukabumi, ketika musim ikan datang dan hasil tangkapan melimpah, keuntungan besar hanya dinikmati para pemilik perahu. Sementara, awak kapal sekadar mencicipi dari keuntungan besar tersebut.

Terlebih lagi nelayan yang hanya menggunakan congkreg atau beleketek. "Pada saat musim ikan tuna misalnya, paling banyak kami mendapatkan lima ekor karena sebagian besar ikan tuna berada di tengah samudra. Ikan-ikan yang kami tangkap, biasanya sebatas *layur* atau ikan-ikan karang yang ditangkap dengan pancingan atau *rawe*," ujar Nurendra (37), warga Cipatuguran Kec. Palabuhanratu. Ayah dari dua anak berusia 12 dan 8 tahun itu, sejak usia 14 tahun, sudah terjun ke laut membantu ayahnya, Madri (61) yang juga masih menggunakan perahu congkreg untuk mencari ikan di perairan dangkal. Nurendra menyatakan, selama ini hidupnya tidak pernah beranjak dari kemiskinan. Rumah yang didiaminya hanya berukuran 4 X 5 meter dengan lantai tanah. Kamar tidur dan sekeliling rumahnya yang hanya dibalut papan, sulit untuk mencegah masuknya angin malam, terlebih jika hujan deras turun, nyaris tak ada perlindungan sama sekali.

Parahnya kehidupan nelayan di Kab. Sukabumi semakin mendera setelah tiga kali kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam satu tahun terakhir ini. Melalui perhitungan sederhana, sekali berangkat dengan

menggunakan beketek, bisa menghabiskan 5 sampai 10 liter solar. Artinya, sudah sekira Rp 40.000,00 uang yang dikeluarkan untuk membeli BBM. Belum lagi keperluan lainnya, seperti makanan dan rokok. Total uang yang harus disiapkan untuk sekali berangkat mencari ikan, tidak kurang dari Rp 50.000,00. Mending kalau memperoleh hasil tangkapan lumayan, bisa dibayangkan kalau hasil tangkapannya hanya tiga ekor *layur* yang jika dijual seluruhnya tidak lebih dari Rp 7.500,00. "Rugi dan rugi terus. Kalau tidak berangkat ke laut, rasanya penasaran. *Sugan jeung sugan*. Tapi lama-kelamaan barang yang ada di rumah habis dijual untuk melaut. Atau utang semakin numpuk. Sekarang *mah* sudah saja berhenti total. Untuk makan seadanya saja. Kalau ada uang hasil kuli, ya beli beras, jika tidak ada bagaimana lagi," kata Nurendra.

Belasan ribu orang yang hidup seperti Nurendra di kalangan nelayan, sudah dianggap biasa. Bahkan, jumlah tersebut dalam kurun dua bulan terakhir ini semakin bertambah banyak jumlahnya. Menurut dua tokoh nelayan, Epen Dolar dan Dede Suryana, berdasarkan perkiraan, dari 16.000 keluarga nelayan di kabupaten ini, mungkin hanya sekira 5% yang masih bertahan menangkap ikan di lautan. Sisanya entah mencari makan ke mana dan sebagai apa. "Sejauh ini memang belum ada berita kelaparan di warga nelayan. Tapi lama-kelamaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Apalagi, jika pemerintah daerah membiarkannya," kata Epen Dolar. Sisa 5% nelayan yang masih melakukan aktivitasnya melaut, itu pun tertolong oleh

adanya 12 rumpon yang tersebar di antara jarak 80 sampai 90 mil dari pesisir pantai. "Mana mungkin bisa terjangkau oleh nelayan tradisional yang hanya menggunakan perahu *beleketek* atau *congkrenng*. Biaya produksi tidak mungkin mengimbangi penghasilan," kata Dede Suryana.

Begitu pula hal yang dialami oleh Mulyono (47th) (Kusnadi:2002), di waktu Subuh pertengahan minggu ini di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Mulyono (47) berbaring di atas kapal selepas berlayar dan tidak dapat kembali ke gubuknya di Kali Adem karena kebanjiran. "Dua hari berlayar cuma dapat ikan kembung 40 kilogram yang dijual Rp 240.000. Saya hanya kebagian Rp 20.000 setelah dipotong bagian juragan lalu dibagi rata enam awak kapal. Hasil minim hanya cukup untuk menyambung utang pada tengkulak. Bagi nelayan tidak ada perlindungan harga dari koperasi atau pemerintah seperti yang dirasakan petani di darat," kata Mulyono. Keluhan tersebut memang beralasan. Pada kondisi sulit ikan, harga membubung hingga Rp 12.000 per kilogram. Namun, saat tangkapan melimpah harga anjlok hingga Rp 2.000 per kilogram.

Dari berbagai peristiwa di atas, menurut Firth yang dikutip Kusnadi, mengatakan kemiskinan nelayan paling tidak dicirikan oleh lima karakteristik yaitu, (1) Pendapatan nelayan bersifat harian (*daily increments*) dan jumlahnya sulit di tentukan, (2) Dilihat dari pendidikannya, tingkat pendidikan nelayan atau anak-anak nelayan pada umumnya rendah, (3) Dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan nelayan. Maka nelayan lebih banyak

berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. Selain itu, sifat produk yang mudah rusak harus segera dipasarkan, menimbulkan ketergantungan yang besar dari nelayan kepada pedagang. Hal ini menyebabkan harga ikan nelayan dikuasai oleh pedagang, (4) Bidang perikanan membutuhkan investasi cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap yang sederhana, ataupun hanya menjadi anak buah kapal (ABK) dalam hubungannya dengan pemilik kapal, nelayan yang terlibat dalam suatu pembagian hasil yang sering tidak menguntungkannya, (5) Kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan sangat besar pada satu mata pencaharian, yaitu menangkap ikan (Kusnadi:2002:33).



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Lokasi

Kota Bau-Bau secara geografis terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya berada di pulau Buton, dengan posisi koordinat sekitar 05°15' hingga 05°32' Lintang Selatan dan 122°30' sampai 122°46' Bujur Timur. Kota Bau-Bau mempunyai luas sekitar 28.060,10 ha, dimana wilayahnya meliputi daratan dan perairan. Secara fisik wilayah Kota Bau-Bau meliputi batas-batas (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001):

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.

Wilayah administrasi/pemerintahan kota meliputi empat wilayah kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Wolio dengan luas 26,77 Km², yang terdiri atas 12 desa/kelurahan yang meliputi: Desa/Kelurahan Bataraguru, Tomba, Wale, Batulo, Wangkanapi, Kadolomoko, Bukit Wolio Indah, Kadolokatapi, Waruruma, Lakologou, Liwuto dan Sukanaeyo.
2. Kecamatan Betoambari dengan luas 34,34 Km², yang terdiri atas 15 desa/kelurahan yang meliputi: Desa/Kelurahan Sulaa,

Waborobo, Baadia, Melai, Wajo, Lamangga, Tanganapada, Lipu, Katobengke, Bone-Bone, Tarafu, Wameo, Kaobula, Lanto dan Ngangana Umala.

3. Kecamatan Bungi dengan luas 76,64 Km², yang terdiri atas 7 desa/keurahan yang meliputi: Desa/keurahan Lowu-Lowu, Kailialia, Liabuku, Ngkari Ngkari, Kampeonaho, dan Palabusa.
4. Kecamatan Sorawoio dengan luas 83,25 Km², yang terdiri atas 4 desa/keurahan yang meliputi: Desa/Keurahan Kaisabu Baru, Karya Baru, Bugi dan Gonda Baru.

Wilayah Kota Bau-Bau dicirikan oleh topografi yang bervariasi. Daerah datar umumnya dijumpai di sepanjang pantai dan bagian Utara dan Barat wilayah Kota. Wilayah bagian Timur didominasi oleh lahan dengan topografi berbukit hingga berbukit, dan wilayah paling Selatan merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng yang sangat terjal (> 40%). Pusat-pusat pemukiman yang ada sekarang ini, khususnya di Kecamatan Betambani dan Woio dan sepanjang pesisir pantai merupakan wilayah yang relatif datar. Sehingga wilayah-wilayah tersebut sangat potensial untuk perkembangan kota di masa yang akan datang. Lokasi kota Bau-Bau dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1. Letak Kota Bau-Bau relatif terhadap Pulau Buton dan Pulau Muna (BPS Kota Bau-Bau, 2003)

Kelurahan Bone-Bone berada di Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau yang merupakan lokasi penelitian, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara $5^{\circ}2'$ - $5^{\circ}33'$ Lintang Selatan dan di antara $122^{\circ}30'$ - $122^{\circ}47'$ Bujur Timur. Daerah Kota Bau-Bau mempunyai iklim sama umumnya dengan daerah lain disekitarnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu udara berkisar 22°C - 33°C .

Musim hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan Desember, pada bulan-bulan tersebut angin barat yang bertiup dari Asia dan Samudera

Pasifik mengandung banyak uap air, musim kemarau terjadi mulai bulan Agustus sampai bulan Oktober, pada bulan-bulan ini angin timur yang bertiup dari wilayah Australia kurang mengandung uap air.

2. Potensi Sumberdaya Alam

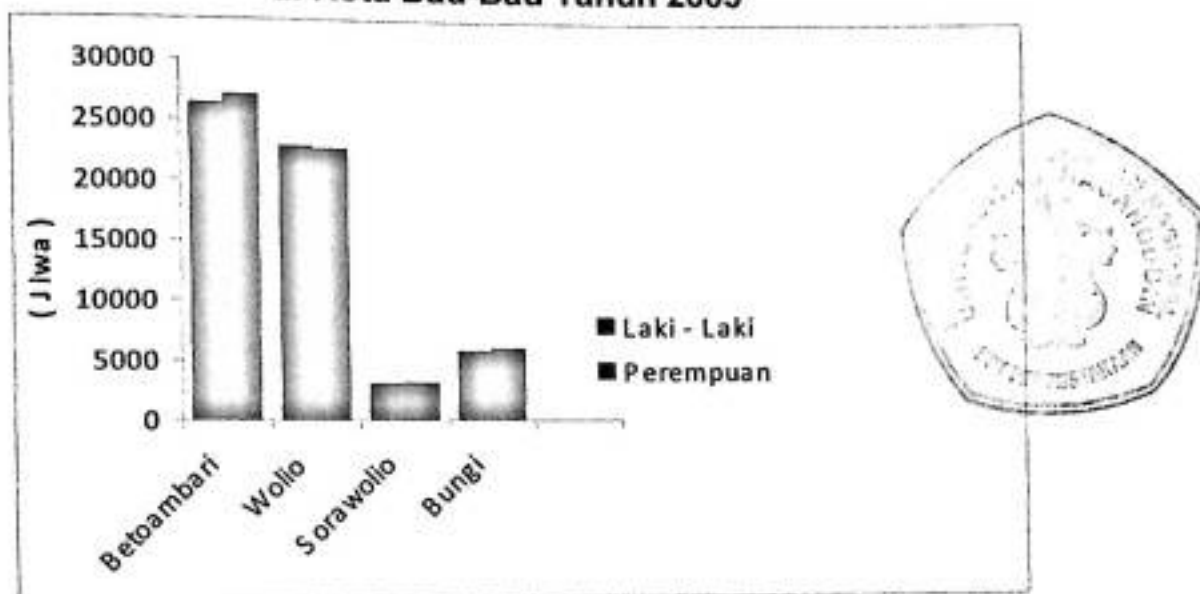
Kelurahan Bone-Bone mempunyai luas sekitar 4,80 Km² yang diperuntukkan untuk pemukiman penduduk 2,80 km²; 0,28 km² dimanfaatkan untuk pekuburan masyarakat; dan 1,80 km² dimanfaatkan untuk perkantoran. Letak Kelurahan Bone-Bone yang berbatasan atau sebagai wilayah pesisir di Selat Buton menyebabkan dari dulu masyarakat dalam wilayah memiliki sistem mata pencaharian yang berorientasi laut. Area wilayah yang dijadikan sebagai wilayah penangkapan meliputi perairan Buton 14 mil di sekitar Kadatua Kabupaten Buton, Pulau Kabaena Kabupaten Bombana, bahkan sampai ke wilayah perairan Pulau Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Komoditi utama sumberdaya perikanan yang ditangkap oleh nelayan Bone-Bone terutama ikan tuna dan tongkol. Saat ini, sebagian keluarga nelayan melakukan budidaya rumput laut sekitar pantai di Lingkungan Kokalukuna Kelurahan Bone-Bone.

3. Demografi

Penduduk Daerah Kota Bau-Bau menurut hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1990 berjumlah 77.224 jiwa dan sepuluh tahun kemudian tepatnya saat Sensus Penduduk 2000 bertambah lagi hingga mencapai

106.092 jiwa. Mengenai persebaran jumlah penduduk Kota Bau-Bau dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 1. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bau-Bau Tahun 2005



Sumber : BPS Kota Bau-Bau 2005

Kemudian data penduduk yang diperoleh dari sistem registrasi penduduk yang diselenggarakan secara rutin dan kontinyu setiap kecamatan/desa mempunyai arti penting karena selain memberikan gambaran jumlah penduduk setiap akhir tahunnya juga berguna sebagai pembandingan hasil sensus maupun survei.

Selanjutnya melihat hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2005 berjumlah 116.901 jiwa yang terdiri dari laki - laki 58.002 jiwa dan perempuan 58.899 jiwa. Angka-angka jumlah penduduk yang dirinci menurut kecamatan tahun 2005 disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.1. Jumlah Penduduk Kota Bau-Bau Menurut Kecamatan Tahun 2005

Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Betoambari	27.584	27.910	55.494
Wolio	22.900	22.732	45.632
Sorawolio	3.133	3.310	6.443
Bungi	6.010	6.090	12.100
Jumlah	59.627	60.042	119.669

Sumber : BPS Kota Bau-Bau, Tahun 2005

Berdasarkan data BPS kota Bau-Bau, jumlah penduduk kota bau-bau tahun 2005 sebanyak 119.669 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan. Dengan penduduk terbesar 55.494 jiwa mendiami Kecamatan Betoambari. Jika dilihat pada tabel diatas, secara keseluruhan penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 60.042 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki 59.494 jiwa.

Kelurahan Bone-Bone merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Betoambari. Jumlah Penduduk Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau berdasarkan data Monografi Kelurahan Tahun 2006 berjumlah 6222 jiwa, yang terdiri atas 3.011 jiwa penduduk laki-laki dan 3.211 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan

komposisi umurnya penduduk Kelurahan Bone-Bone dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2. Distribusi Penduduk Kelurahan Bone-Bone

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)
1	0 - 10 tahun	1.671
2	11 tahun - 20 tahun	1.623
3	21 tahun - 30 tahun	1.224
4	31 tahun - 40 tahun	810
5	41 tahun - 50 tahun	496
6	51 tahun - ke atas	279
	Jumlah	6.103

Sumber : Data monografi Kelurahan Bone-Bone, Tahun 2006

Berdasarkan tabel tersebut di bawah ini, usia produktif antara 21 tahun ke atas sampai 50 tahun, sedangkan usia/angka ketergantungan usia 0 - 10 tahun dan 51 tahun ke atas. Untuk usia-usia yang produktif antara 21 tahun - 50 tahun yang berjumlah 2.530 orang, sedangkan jumlah angka ketergantungan 3.627 orang.

4. Mata Pencaharian

Letak Kelurahan Bone-Bone sebagai wilayah pesisir sangat memungkinkan masyarakatnya sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan. Selain itu, selama ini penduduk usia produktif biasanya merantau ke wilayah Papua dan Batam untuk melangsungkan hidupnya. Untuk lebih

jelasan, mengenai mata pencaharian penduduk Kelurahan Bone-Bone dapat dilihat di bawah ini.

Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah mata pencaharian penduduk terbesar di Kelurahan Bone-Bone yakni nelayan (1.100 orang). Dari jumlah nelayan 1.100 orang ada yang bekerja berdasarkan organisasi kenelayanan dan ada pula nelayan mandiri. Nelayan yang tergabung dalam organisasi kenelayanan, terdiri atas; bos, dan ABK yang terdiri dari nahkoda, *boy-boy* (pembuang umpan), pemancing, dan bas. Sedangkan nelayan yang bekerja sendiri hanya memancing dengan menggunakan perahu atau sebagian *kuli jala* pada organisasi kenelayanan. Saat ini, karena kegiatan mereka sudah jarang melaut, nelayan banyak berprofesi sebagai tukang ojek atau petani budidaya rumput laut.

Tabel III.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kelurahan Bone-Bone

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri	310
2	Pengrajin tenun	834
3	Pedagang	20
4	Penjahit	4
5	Tukang Batu	13
6	Tukang Kayu	4
7	Peternak	4
8	Ojek	100
9	Nelayan	1100
10	Montir	3
11	Sopir	10
12	TNI/Polri	20

Sumber : Data monografi Kelurahan Bone-Bone, Tahun 2005

Secara umum, mata pencaharian penduduk Kelurahan Bone-Bone sebagian besar sebagai nelayan karena merupakan wilayah pesisir. Sebagian besar juga sebagai PNS di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Selain itu juga terdapat terdapat 834 orang bekerja sebagai pengrajin tenun. Kegiatan ini dilakukan para istri nelayan atau janda-janda banyak melakukan industri kerajinan rumah tangga sebagai penenun kain khas Buton. Akhir-akhir ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebanyakan penduduk Kelurahan Bone-Bone menjadikan ojek sebagai mata pencaharian alternatif. Untuk penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang biasanya mereka melakukan perdagangan antar pulau-pulau dan pedagang tetap di Pasar Wameo. Ada pula mata pencaharian lain yang dijalani masyarakat Bone-bone seperti: 4 orang yang berprofesi sebagai penjahit, tukang batu 13 orang, tukang kayu 4 orang, peternak orang, montir 3 orang, serta 20 orang berprofesi sebagai anggota TNI/Polri.

5. Sarana Prasarana

a. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kelurahan Bone-Bone saat ini satu buah puskesmas dan dua buah posyandu. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan penduduk biasanya juga memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau, poliklinik, dan dokter-dokter praktek bagi penduduk yang mampu. Bagi keluarga miskin salah satu

alternatif pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah dukun, bahkan ada yang hanya berbaring di rumah sambil membeli obat di warung-warung dekat permukiman mereka.

Bagi nelayan di Kelurahan Bone-Bone, dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesehatan biasanya dilakukan di puskesmas, walaupun penyakitnya agak parah maka mereka langsung ke dokter praktek atau Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau. Bagi nelayan miskin yang tidak mempunyai cukup uang untuk berobat di Puskesmas atau di RSUD, mereka berobat pada dukun.

b. Pendidikan dan Agama

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kelurahan Bone-Bone saat ini terdapat 2 buah Sekolah Dasar dan 2 buah Taman Kanak. Selain pendidikan formal di Kelurahan Bone-Bone terdapat pendidikan non formal keagamaan berupa Taman Pendidikan Al Quran yang terdapat 12 buah. Untuk melanjutkan pendidikan tingkat SLTP dan SLTA bahkan perguruan tinggi mereka melanjutkannya di wilayah kelurahan lain yang masih berbatasan dengan Kelurahan Bone-Bone yang masih dalam wilayah Kota Bau-Bau. Masalah utama yang dialami oleh keluarga nelayan miskin dalam memperoleh pendidikan khususnya pemenuhan pendidikan tingkat SLTP dan SLTA, karena untuk melanjutkan pendidikan

selain biaya sekolah juga mereka harus memberikan biaya tambahan (transport) kepada anak-anaknya yang mau ke sekolah.

Masyarakat kelurahan Bone-Bone sebagian besar memeluk agama islam, Untuk sarana peribadatan di Kelurahan Bone-Bone terdapat dua buah mesjid, yaitu Mesjid Baitul Hikmah di Lingkungan Wanggaangaa, dan Mesjid Nurul Iksan di Lingkungan Kaluku. Selain itu, untuk sarana peribadatan juga terdapat satu buah surau di Lingkungan Kaluku.

c. Fasilitas Air Minum dan Penerangan

Fasilitas lainnya yang terdapat di Kelurahan Bone-Bone berupa fasilitas/prasarana air bersih 11 unit sumur gali yang digunakan oleh 13 rumah tangga. Selain itu untuk air bersih yang digunakan untuk minum mereka menggunakan air PDAM atau membeli pada pedagang keliling/galon. Saat ini, masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan air PDAM karena hanya 10% dari jumlah rumah di Kelurahan yang memiliki air PDAM, sehingga mereka harus numpang ke rumah-rumah tetangga untuk mendapatkan air bersih dari PDAM.

Kebutuhan penerangan pada tiap rumah tangga bagi penduduk Kelurahan Bone-Bone karena hampir sebagian besar rumah sudah menikmati listrik PLN, kecuali masih ada sekitar 121 KK keluarga miskin masih menggunakan lampu tempel dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah.

d. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Fasilitas ekonomi yang menunjang seperti pasar dan pelelangan ikan mereka menggunakan pasar Wameo yang terdapat di sebelah barat dan masih berbatasan dengan lokasi ini. Fasilitas lain berupa tempat pengeringan ikan, pembuatan/perbaikan jalan, dilakukan di wilayah pantai sekitar pemukimannya.

Fasilitas yang menunjang aktifitas nelayan di Kelurahan Bone-Bone terdapat dua buah dermaga, satu terdapat di perbatasan Kelurahan Bone-Bone dan Kelurahan Tarafu yang dibangun oleh pemerintah, dan satunya lagi terdapat di sekitar Perusahaan Penampungan ikan yang dibangun oleh PT. Bonekom yang biasanya menampung ikan hasil tangkapan nelayan. Kedua dermaga ini dapat diakses langsung oleh nelayan di Kelurahan Bone-Bone.

6. Organisasi/Kelembagaan sosial

Masyarakat Kelurahan Bonebone merupakan masyarakat asli Suku Buton menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis kerabat laki-laki dan perempuan (bilateral). Dalam struktur masyarakat Buton, mereka terbagi dalam tiga tingkatan yakni, (1) golongan *kaomu* sebagai golongan tertinggi, (2) golongan *walaka* sebagai golongan menengah, dan (3) golongan *papara* sebagai golongan rendah. Pada saat ini pembagian golongan sudah bukan lagi menjadi ukuran dalam pergaulan sehari-hari. Meskipun demikian, masih

ada golongan bangsawan yang menggunakan gelar *laodel/waode*. Kesatuan sosial berdasarkan hubungan kekerabatan mulai dari sepupu sekali (*tolida*), sepupu dua kali (*topendua*), sepupu tiga kali (*topentalu*), dan sepupu empat kali (*poabaaka*). Pola menetep setelah menikah, dimana sepasang suami isteri yang baru menikah menetep di rumah keluarga istri (*matrilokal*). Mereka baru mendirikan rumah atau meninggalkan rumah orang tua setelah memiliki rumah sendiri atau mengontrak rumah lain.

Organisasi formal yang ada mulai dari tingkat Kelurahan, Lingkungan. Selain itu, terdapat organisasi PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sejak berlakunya undang-undang otonomi daerah, pada tahun 2002 di Kelurahan Bonebone terbentuk Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai organisasi pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada masa orde baru. LPM beranggotakan seluruh komponen atau tokoh masyarakat di Kelurahan yang berfungsi mengontrol pelaksanaan pembangunan di kelurahan. Segala program baik dalam bentuk bantuan dari pemerintah, lembaga donor, LSM, dan swadaya masyarakat selalu dilakukan bersama-sama anggota LPM. Kesatuan atau organisasi di dalam kelurahan adalah Rukun Warga (RW) yang diketuai oleh Ketua RW dan selanjutnya Rukun Tetangga (RT) yang diketuai oleh Ketua RT.

7. Karakteristik Informan

Untuk mendukung validitas data dalam penelitian, peneliti melakukan wawancara pada beberapa informan yang cukup mengetahui data yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik purposive dengan memperhatikan karakteristik informan.

Data informan menurut umur dan jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.5 Informan menurut umur dan jenis kelamin

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Valen	25 th	Laki-Laki	ABK
2	Alimuddin	45 th	Laki-Laki	Pengelola
3	Laode Sairi	44 th	Laki-Laki	Pemilik
4	Syamsiah	42 th	Wanita	Istri Nelayan/Penenun
5	Kardiman	25 th	Laki-Laki	ABK/Kuli jala
6	Alias	28 th	Laki-Laki	ABK
7	Djahar, SH	41 th	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat
8	H. Kasim	54 th	Laki-Laki	Pemilik
9	Muhdi	37 th	Laki-Laki	ABK
10	Sulaiman	26 th	Laki-Laki	ABK
11	Samsu	30 th	Laki-Laki	ABK/Kuli jala
12	Fajar	32 th	Laki-Laki	ABK
13	Muh.Aedurusu	30 th	Laki-Laki	ABK/Kuli jala
14	Batra	18 th	Laki-Laki	ABK
15	Budiman	29 th	Laki-Laki	ABK/Kuli jala
16	Anton	20 th	Laki-Laki	ABK/Kuli jala
17	Zaenuddin	35 th	Laki-Laki	ABK
18	Karman	35 th	Laki-Laki	ABK
19	Faisal	29 th	Laki-Laki	ABK
20	Dedi Mizwar	25 th	Laki-Laki	ABK
21	Muksin	32 th	Laki-Laki	ABK
22	Ahmad	34 th	Laki-Laki	ABK
23	La Aeyu	33 th	Laki-Laki	ABK
24	Hamrin	26 th	Laki-Laki	ABK
25	Musfin	24 th	Laki-Laki	ABK

Sumber : Data Primer Yang Diolah Tahun 2006

Dari tabel diatas jumlah informan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Informan yang tergolong muda adalah Batra 18 tahun sedangkan informan yang tergolong usia tua adalah H. Kasim 54 tahun. Berdasarkan profesi dari tabel diatas dapat di lihat 15 orang Abk, 1 orang istri nelayan/penenun, 2 orang pemilik, 1 orang pengelola, 5 orang ABK sekaligus kuli jala, 1 orang tokoh masyarakat.

Jika dilihat dari segi pengalaman dalam aktivitas kenelayanan, maka lamanya waktu yang mereka gunakan untuk menggeluti pekerjaan tersebut cukup bervariasi. Ada yang sudah lebih 10 tahun dan ada yang baru beberapa tahun. Pengalaman dalam kenelayaan membentuk bermacam pengetahuan tentang kondisi laut, jenis alat tangkap dan cara menggunakannya, syarat dalam merekrut anggota (ABK), dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya tabel di bawah ini memperlihatkan data informan berdasarkan pengalaman dalam aktivitas kenelayanan :

Tabel III. 6. Informan menurut pengalaman dalam aktivitas kenelayanan

No	Nama	Pengalaman
1	Valen	3 tahun
2	Alimuddin	15 tahun
3	Laode Sairi	6 tahun
4	Syamsiah	5 tahun
5	Kardiman	6 tahun
6	Alias	3 tahun
7	H. Kasim	15 tahun
8	Muhdi	10 tahun
9	Sulaiman	10 tahun
10	Samsu	5 tahun
11	Fajar	5 tahun
12	Muh.Aedurusu	6 tahun
13	Batra	1 tahun
14	Budiman	7 tahun
15	Anton	3 tahun
16	Zaenuddin	13 tahun
17	Karman	7 tahun
18	Faisal	9 tahun
19	Dedi Mizwar	7 tahun
20	Muksin	15 tahun
21	Ahmad	12 tahun
22	La Aeyu	6 tahun
23	Hamrin	4 tahun
24	Musfin	7 tahun

Sumber : Data Primer Yang Diolah Tahun 2006

Pada tabel diatas menunjukkan rata-rata pengalaman informan berkisar 1-15 tahun. Alimuddin dan H. Kasim merupakan informan yang paling lama bergelut dalam aktivitas kenelayanan sedangkan Batra baru menjalani aktivitas kenelayan selama 1 tahun.

Kepandaian seseorang kadang diukur dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin pandai. Dalam aktivitas

kenelayanan hal tersebut, bukan hal yang utama dalam menekuni aktivitas kenelayanan. Tingkat pendidikan masing-masing masing-masing informan juga bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III. 7. Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Nama	Tingkat Pendidikan
1	Valen	Tamat SLTP
2	Alimuddin	Tamat SMU
3	Laode Sairi	Tamat SMU
4	Syamsiah	Tidak Tamat SMU
5	Kardiman	Tamat SLTP
6	Alias	Tamat SMU
7	Djafar, SH	Tamat Perguruan Tinggi
8	H. Kasim	Tamat SMU
9	Muhdi	Tamat SMU
10	Sulaiman	Tamat SLTP
11	Samsu	Tidak Tamat SMU
12	Fajar	Tamat SLTP
13	Muh.Aedurusu	Tidak Tamat SD
14	Batra	Tidak tamat SMU
15	Budiman	Tamat SMU
16	Anton	Tamat SLTP
17	Zaenuddin	Tamat SLTP
18	Karman	Tidak Tamat SLTP
19	Faisal	Tidak Tamat SLTP
20	Dedi Mizwar	Tamat SD
21	Muksin	Tamat SD
22	Ahmad	Tamat SMU
23	La Aeyu	Tamat SMU
24	Hamrin	Tidak Tamat SMU
25	Musfin	Tamat SMU

Sumber : Data Primer Yang Diolah Tahun 2006

Dari tabel diatas, informan yang tidak tamat SD sebanyak 1 orang, tamat SD sebanyak 2 orang, tidak tamat SLTP sebanyak 2 orang, tamat

SLTP sebanyak 6 orang, tidak tamat SMU sebanyak 4 orang, tamat SMU 9 orang, dan tamat perguruan tinggi 1 orang.

Modal usaha untuk pembelian kapal dan peralatan tangkap lainnya, seorang pemilik seperti laode Sairi dan H. Kasim mendapatkan modal dari pinjaman bank.

ABK dalam sebuah kapal kenelayan sering kali direkrut berdasarkan sistem kekerabatan. Pada tabel di bawah dapat dilihat struktur diatas kapal, dimana sebagian ABK dari struktur merupakan informan.

Tabel III. 8. Struktur ABK tetap pada kapal yang di miliki oleh Laode Sairi dan hubungan kekerabatannya.

No.	Nama	Posisi diatas kapal	Keterangan
1	Muhdi	Nahkoda	Keluarga Ld. Sairi
2	Kardiman	Juru Mudi	Keluarga Ld. Sairi
3	Sulaiman	Bass	Penduduk setempat
4	Samsu	Koki	Penduduk setempat
5	Fajar	Pemancing	Keluarga Ld. Sairi
6	Muh. Aedurusu	Pemancing	Keluarga Ld. Sairi
7	Batra	Boy-Boy	Keluarga Ld. Sairi
8	Budiman	Pemancing	Keluarga Ld. Sairi

Sumber: data primer diolah tahun 2006

Pada tabel diatas dapat dilihat sebgain besar ABK merupakan keluarga dari pemilik. Muhdi adalah sepupu Ld. Sairi, Kardiman, Muh. Aedurusu, Batra dan Budiman merupakan Keluarga jauh Ld. Sairi. Fajar Sepupu Ld. Sairi sekaligus adik dari Muhdi. Dan 2 orang lainnya merupakan penduduk setempat.

Tabel III. 9. Struktur ABK tetap pada kapal yang di kelola oleh Alimuddin dan hubungan kekerabatannya.

No.	Nama	Posisi diatas kapal	Keterangan
1	Zaenuddin	Nahkoda	Penduduk setempat Penduduk setempat Keluarga Alimuddin Keluarga Alimuddin Penduduk setempat Penduduk setempat Penduduk setempat Penduduk setempat Keluarga Alimuddin
2	Naim	Juru Mudi	
3	Karman	Bass	
4	Faisal	Koki	
5	Anton	Pemancing	
6	Dedi Mizwar	Pemancing	
7	La baelo	Pemancing	
8	La baura	Pemancing	
9	Umar	Boy-Boy	

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2006

Pada tabel diatas dapat dilihat ada 6 orang ABK yang merupakan penduduk setempat. Karman dan umar merupakan keluarga jauh Alimuddin dan Faisal adalah adik dari Alimuddin.

Tabel III. 10. Struktur ABK tetap pada kapal yang di miliki oleh H.Kasim dan hubungan kekerabatannya

No.	Nama	Posisi diatas kapal	Keterangan
1	Muksin	Nahkoda	Keluarga H.Kasim Keluarga H.Kasim Penduduk Setempat Keluarga H.Kasim Keluarga H.Kasim Penduduk Setempat Penduduk Setempat Keluarga H.Kasim Keluarga H.Kasim Keluarga H.Kasim
2	Ahmad	Juru Mudi	
3	La Aeyu	Bass	
4	La iko	Koki	
5	Hamrin	Pemancing	
6	La Abelo	Pemancing	
7	La Ala	Pemancing	
8	Musfin	Pemancing	
9	Didi	Boy-Boy	
10	Rahmat	Pemancing	

Sumber: data primer yang diolah tahun 2006

Pada tabel diatas dapat dilihat ada 7 orang ABK yang merupakan keluarga dari H. Kasim dan 3 orang ABK lainnya merupakan penduduk setempat.

BAB IV

PEMBAHASAN

Masyarakat Kelurahan Bone-Bone adalah masyarakat yang dalam definisi Lampe dikatakan sebagai masyarakat bahari, yaitu merupakan kesatuan-kesatuan hidup manusia berupa kelompok-kelompok kerja, kampung, desa, suku bangsa (*ethnic group*), komuniti-komuniti, kesatuan-kesatuan administratif berupa kecamatan, propinsi, bahkan bisa merupakan negara atau kerajaan, yang sebagian besar atau sepenuhnya menggantungkan kehidupannya secara langsung atau tidak langsung pada pemanfaatan sumberdaya hayati atau non hayati laut serta jasa-jasa laut yang dipedomani oleh dan dicirikan bersama dengan kebudayaan baharinya. Pada Bab IV ini kami akan mendeskripsikan struktur kelompok-kelompok nelayan dan kelompok-kelompok kerjasama nelayan cakalang dan aturan bagi hasil masyarakat Bone-Bone.

Guna memudahkan penulis dalam memetakan pola diatas, perlu diatur sebelumnya definisi nelayan yang akan dipakai. Sesuai dengan kesimpulan pada Bab III, yang dimaksud dengan nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya mencari dan menangkap ikan, serta memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam yang terpendam di laut dengan menggunakan alat bantu dan mempunyai pengetahuan tentang laut.

A. Gambaran Aktivitas Sehari-hari Nelayan Cakalang

Nelayan Bone-Bone yang umumnya merupakan nelayan penangkap ikan cakalang, memiliki aktivitas sehari-hari yang berbeda dengan nelayan tradisional dalam komunitas tersebut. Mereka tidak selalu bisa melaut mencari ikan. Ini dikarenakan aktivitas pencarian ikannya yang spesifik hanya pada ikan cakalang yang waktu tangkapannya terbatas oleh beberapa hal seperti ketersediaan umpan, musim dan sarana prasarana perikanan khususnya kapal. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kusumastanto (2003) mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan, yaitu (1) kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi sangat tergantung pada kondisi ekosistem dan lingkungan yang rentan terhadap kerusakan, khususnya pencemaran dan degradasi kualitas lingkungan. (2) persoalan yang paling mencolok pada kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan pada musim yang sangat besar, khususnya bagi nelayan kecil. Pada musim penangkapan, mereka sangat sibuk, sementara pada musim paceklik mereka mencari kegiatan ekonomi lain kalau bukan menganggur. Secara umum pendapatan masyarakat nelayan sangat fluktuatif. Kondisi ini tercermin juga dari pola hidup masyarakat nelayan yang pada musim panen cenderung bersifat konsumtif atau berfoya-foya, sebaliknya pada musim paceklik mereka banyak meminjam uang pada rentenir atau tengkulak. (3) kelompok masyarakat nelayan sangat tergantung pada pasar. Hal ini dikarenakan komoditas yang

dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau karena akan membusuk sebelum laku dijual.

Dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang apa saja yang menjadi aktivitas nelayan, maka berikut ini digambarkan dua pola aktivitas nelayan, yakni pola aktivitas saat melaut dan saat tidak melaut.

1. Aktivitas saat melaut

Aktivitas nelayan Bone-Bone saat melaut meliputi beberapa kegiatan yang berorientasi pada bagaimana agar kegiatan penangkapan dapat menghasilkan tangkapan yang banyak. Tak heran jika masa melaut para nelayan Bone-Bone dalam satu kali pemberangkatan tidaklah menentu. Kadang hanya sehari, dua hari, tiga hari bahkan dapat mencapai empat hari jika ruang penyimpanan ikan belum terisi penuh dan umpan masih cukup untuk melakukan kegiatan penangkapan. Namun masa melaut yang umum mereka jalani yaitu hanya satu hari. Berikut adalah gambaran aktivitas para nelayan tersebut pada saat-saat melakukan kegiatan penangkapan ikan atau melaut.

Pengadaan umpan. Sebelum berlayar mencari ikan, nahkoda perlu memastikan ketersediaan umpan. Hal ini menjadi mutlak karena kegiatan penangkapan ikan tidak bisa dilakukan tanpa ketersediaan umpan, walaupun telah masuk musim penangkapan. Umpan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan cakalang adalah ikan teri yang dalam bahasa lokal disebut *baelo*. Umpan tersebut dibeli dari para nelayan

bagang (*bangkana jala*) dan nelayan rumpon (*parumpo*) dari Batauga yang memang mengkhususkan diri untuk mencari ikan *baelo*.

Pengadaan logistik. Setelah adanya kepastian tentang ketersediaan umpan, maka ABK yang lainnya bertugas untuk mengadakan logistik secukupnya yang sesuai kebutuhan selama pelayaran. Logistik yang dimaksud berupa solar, beras, gula pasir, air minum dan air cuci, rokok dan obat-obatan. Tempat pengambilan logistik berbeda-beda diantara kelompok-kelompok nelayan. Sebagian besar dari mereka mengambil di warung yang menjadi langganannya, yang akan dilunasi pada saat mereka kembali dari menangkap ikan.

Pemberangkatan ke lokasi dan penentuan lokasi penangkapan.

Setelah pengadaan umpan dan pengadaan logistik telah rampung, maka saatnyalah dilakukan pemberangkatan ke lokasi penangkapan. Lokasi yang sering didatangi oleh nelayan adalah perairan Pulau Batu Atas yang berada 60 mil laut di sebelah selatan Bone-Bone. Untuk menemukan titik penangkapan ikan, maka kapal diarahkan ke daerah yang mana sebelumnya sudah pernah dilakukan penangkapan. Sedangkan untuk mengetahui titik di mana terdapatnya ikan, maka nahkoda menggunakan penanda alam meliputi : keberadaan lumba-lumba, burung camar, batang dan pohon.

Aktivitas penangkapan. Bilamana kapal sampai di daerah perairan penangkapan (*fishing ground*), maka setiap nelayan terutama yang ditugasi mematai-matai keberadaancakalang di laut, memandang ke sana ke mari untuk mencari lokasi-lokasi dimana kelompok-kelompok cakalang berada. Bilamana kelompok cakalang ditemukan, maka nahkkoda memerintahkan pada juru mudi dan juru mesin memberhentikan kapal dan mematikan mesin. Semua nelayan mempersiapkan pancingnya pada pinggir kiri dan kanan kapal. Pemancingan dimulai secara serentak pada saat seorang nelayan (istilahnya boy-boy) menaburkan umpan (berupa ikan-ikan teri) kearah sebelah kiri dan kanan kapal. Dengan posisi berjejer sepanjang dinding kapal saling membelakangi, nelayan melakukan pemancingan. Selama boy-boy masih menaburkan umpan, selama itu pula penangkapan berlangsung. Bilamana kelompok-kelompok ikan besar sudah banyak ditangkap, biasanya hanya dua atau tiga kali penangkapan berlangsung, kondisi tangkapanpun sudah banyak lalu nahkoda memutuskan untuk meninggalkan lokasi kembali ke darat, sebaliknya sering pula dalam sekali pemberangkatan dilakukan penangkapan berkali-kali karena kelompok-kelompok cakalang yang ditemukan kecil (sedikit populasinya). Dalam kondisi demikian, maka nelayan biasanya melaut hingga lebih dari satu hari.

Kembali dari laut. Bilamana hasil tangkapan sudah cukup memenuhi ruang-ruang penyimpanan ikan yang berada di geladak, maka nahkoda

memutuskan untuk kembali ke darat. Bisa juga terjadi walaupun ikan belum cukup namun umpan telah habis, kelompok nelayan pun menyepakati kembali ke darat.

Pemasaran tangkapan. Dalam perjalanan pulang, kapal bukan langsung ke pemukiman nelayan, melainkan ke arah pelabuhan/dermaga yang terletak di kawasan perusahaan. Yang membeli ikan cakalang adalah perusahaan Senapati dan Bonekom dan *pappalele*.

2. **Aktivitas pada saat kapal cakalang tidak beroperasi**

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa nelayan di Kelurahan Bone-Bone tidak selalu dapat melaut mencari ikan. Menurut informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa rata-rata waktu tunggu mereka dalam setahun yaitu 4 – 6 bulan dengan masa penangkapan dalam waktu satu tahun rata-rata hanya tiga bulan. Hal ini tentu saja berakibat selain muncul kebosanan nelayan juga menimbulkan masalah perekonomian keluarga nelayan. Olehnya itu, untuk mengisi waktu menunggu dan mencari tambahan penghasilan maka umumnya mereka melakukan berbagai aktivitas produktif seperti digambarkan sebagai berikut.

Menangkap ikan secara tradisional. Untuk mengisi waktu menunggu yang biasanya cukup lama dan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup, salah satu aktivitas nelayan Bone-Bone adalah melakukan penangkapan ikan secara tradisional. Kegiatan penangkapan ikan secara tradisional ini dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan

memakai perahu tanpa mesin (dalam bahasa lokal disebut *pabose-bose*) dan yang memakai perahu bermesin tempel (dalam bahasa lokal disebut *katinti*). Untuk yang memakai *pabose-bose* biasanya dilakukan oleh satu orang. Adapun yang memakai perahu *katinti* umumnya terdiri dari 2 - 3 orang. Penggunaan kedua bentuk perahu tersebut memiliki implikasi yang berbeda dalam jarak dan waktu tempuh, yang tentu saja mempengaruhi kondisi jumlah tangkapan. Untuk nelayan yang menggunakan *pabose-bose* biasanya beroperasi pada daerah yang berjarak 1 - 2 mil laut dari perkampungan dengan rata-rata hasil tangkapan 2 - 3 ekor ikan cakalang dan atau beberapa ekor cumi-cumi. Adapun nelayan yang memakai *katinti* mampu melakukan operasi hingga ke daerah yang jaraknya sekitar 4 mil laut dari kampung dengan rata-rata jumlah tangkapan sebanyak 20 - 30 ekor. Perbedaan jumlah tangkapan yang signifikan ini disebabkan nelayan *katinti* mampu mencapai lokasi-lokasi keberadaan ikan lebih dahulu ketimbang mereka yang memakai *pabose-bose* sehingga hasil tangkapan nelayan *pabose-bose* hanyalah sisa-sisa ikan yang tidak tertangkap oleh para nelayan *katinti*.

Selanjutnya dari perbedaan besar hasil tangkapan ini memunculkan perbedaan penjatahan hasil tangkapan. Nelayan *pabose-bose* memanfaatkan hasil tangkapannya umumnya hanya sebatas konsumsi rumah tangga. Adapun nelayan *katinti* selain memanfaatkan memanfaatkan hasil tangkapannya untuk memenuhi kebutuhan di rumah,

juga menjualnya baik ke pasar maupun ke para tetangga yang membutuhkan.

Menjadi kuli jala pada kapal lain. *Kuli jala* merupakan istilah lokal yang diperuntukkan bagi mereka yang ikut memancing pada kapal cakalang lain karena kapalnya sendiri tidak beroperasi disebabkan tidak tersedianya umpan atau karena tidak di dok. Menjadi *kuli jala* pada kapal lain merupakan kegiatan sampingan para nelayan yang kapalnya tidak beroperasi, dan sudah berlangsung cukup lama dalam komunitas nelayan Bone-Bone.

Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi yang menjalaninya, tetapi juga bagi nahkoda kapal yang ditempatinya bekerja. Bagi yang menjadi kuli jala, manfaatnya adalah mereka mendapatkan penghasilan di saat kapal yang menjadi tempat kerja tetapnya tidak sedang melaut. Bagi nahkoda, dengan adanya para *kuli jala* ini, mereka dapat melihat calon-calon pemancing yang akan dipanggilnya bekerja di kapal tersebut jika dia membutuhkan tenaga pemancing. Ini penting bagi nahkoda mengingat bahwa para pemancing dapat sekali-kali meninggalkan pekerjaannya, baik untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Mengecek dan memperbaiki peralatan. Salah satu kegiatan pengisi rutin dilaksanakan di saat kapal tidak melaut adalah memeriksa dan memperbaiki peralatan. Kegiatan ini bertujuan selain untuk merawat kapal juga untuk mengetahui kekurangan yang perlu segera mendapat

perhatian agar nantinya pada saat waktu melaut telah tiba, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Membudidayakan rumput laut. Saat ini salah satu sektor kegiatan ekonomi beberapa nelayan Bone-Bone. Sebagai alternatif dari aktivitas menangkap ikan, yang digeluti ketika tidak sedang melaut adalah melakukan usaha budidaya rumput laut di perairan sekitar kampung. Kegiatan ini baru berlangsung sekitar 4 tahun dan telah dilakukan beberapa kali panen. Namun menurut nelayan yang ikut membudidayakan rumput laut ini, hasilnya tidaklah sebanyak yang didapatkan dari kegiatan melaut.

Jalankan ojek. Walaupun aktivitas mengojek di Kota Bau-Bau telah berlangsung sekitar enam tahun yaitu sejak tahun 2000, kegiatan ini mulai marak dijadikan sebagai kegiatan sampingan para nelayan di Bone-Bone barulah sekitar tiga tahun belakangan ini.

Untuk menjalani aktivitas sampingan ini, mereka melakukannya dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menyewa motor dari pemiliknya yang memiliki kendaraan berlebih. Tata cara pembayaran umumnya adalah dengan membayar sewa perhari kepada pemilik kendaraan. Cara kedua adalah dengan mengkredit motor dengan mengatasnamakan kerabat keluarga yang memiliki daftar gaji.

Menjadi sopir taxi dan pete-pete. Salah satu aktivitas yang juga menjadi kegiatan sampingan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi adalah

dengan menjadi sopir taxi dan sopir pete-pete secara *part time*. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh para nelayan yang bisa mengemudikan mobil.

B. **Tipe/Kategori Kelompok Usaha Nelayan Cakalang dan Struktur Organisasinya.**

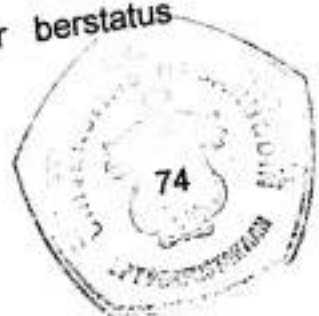
Pada komunitas nelayan Kelurahan Bone-Bone di kenal dua tipe/kategori kelompok usaha nelayan cakalang yang masing-masing dicirikan dengan status kepemilikan dan hubungan dan kerjasama antar anggota didalamnya, kedua tipe kategori kelompok usaha nelayan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Kelompok/Organisasi Nelayan dalam Usaha Cakalang milik Plasma
2. Kelompok/Organisasi Nelayan dalam Usaha Cakalang milik Pengusaha Lokal

Gambaran dari kedua tipe/kategori kelompok usaha nelayan cakalang dan struktur hubungan kerjasamanya masing-masing disajikan berikut ini :

1. Kelompok/Organisasi Nelayan dalam Usaha Cakalang milik Plasma

Usaha penangkapan ikan cakalang secara besar-besaran oleh nelayan Kelurahan Bone-Bone dimulai dengan munculnya usaha Plasma. Usaha Plasma dimaksudkan sebagai usaha yang dalam bentuk unit-unit kapal (lengkap dengan mesin/motor penggerak/dimiliki oleh perusahaan/perikanan besar berstatus

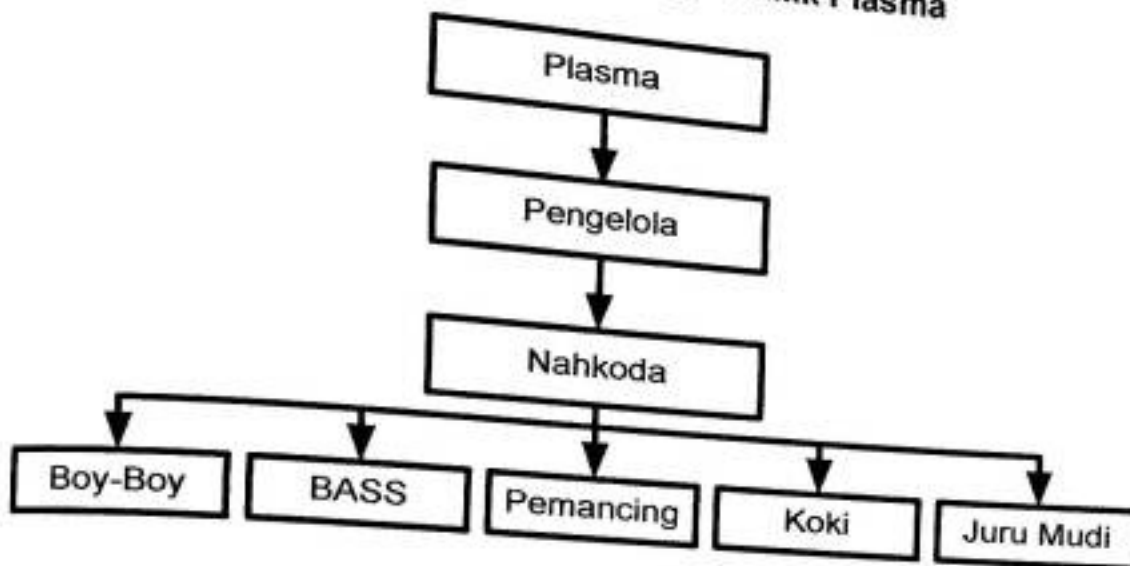


swasta. Unit-unit usaha perikanan cakalang berstatus Plasma di Kelurahan Bone-Bone sebetulnya percabangan/bagian dari usaha privat/swasta yang daerah operasinya berpusat di Flores, Nusa Tenggara timur. Di Flores usaha perikanan tersebut diadakan dari awal periode 1990-an, kemudian dikembangkan ke Buton (Sulawesi Tenggara) yang dioperasikan oleh nelayan Kelurahan Bone-Bone sejak paruh kedua 1990-an.

Plasma yang berada di Flores merekrut orang setempat di Kelurahan Bone-Bone sebagai pembantu pengelolaan operasional. Dalam istilah sehari-hari, oleh masyarakat nelayan Bone-Bone, pembantu pengelolaan tersebut disebut "*pengelola*" saja.

Pengelola tersebut diberi tugas oleh Plasma di Flores untuk mencari dan merekrut nahkoda/kapten kapal perikanan cakalang. Berikut nahkoda diberi tugas untuk mencari dan merekrut anak buah kapal (*crewmen/sawi* dalam bahasa Bugis dan Makassar) dari penduduk setempat. Demikian halnya dalam hal pemberhentian/pemecatan anak buah yang tidak disukai. Jadi kelompok usaha Plasma terdiri dari pemilik usaha (Plasma), *pengelola*, *nahkoda*, dan para anak buah kapal (ABK). Pengorganisasian peranan dari kelompok-kelompok usaha perikanan tipe Plasma dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Nelayan Milik Plasma



1.1 Plasma

Plasma ialah perusahaan perikanan yang berada di Flores yang memiliki unit-unit kapal dan tersebar di beberapa wilayah kabupaten dalam provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan di provinsi lain, seperti Kelurahan Bone-Bone Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Oleh jumlah unit usaha adalah banyak dan disebar ke berbagai daerah yang saling berjauhan, maka oleh Plasma (rupanya terdiri dari beberapa orang) mengangkat satu atau lebih orang setempat (dimana unit-unit usaha dioperasikan) untuk membantunya dalam pengelolaan operasional dan penjualan tangkapan.

1.2 Pengelola

Pengelola ialah pembantu atau wakil dari manajer usaha yang manajer sendiri rekrut di daerah operasi, yang dalam konteks

penelitian ini ialah Kelurahan Bone-Bone. Pada mulanya di Bone-Bone terdapat tiga sampai empat pengelola. Setiap pengelola bertanggung jawabkan 3 (tiga) hingga 5 (lima) unit kapal ikan. Akhir-akhir ini di Bone-Bone tinggal dua atau tiga orang pengelola. Pengurangan tersebut diakibatkan oleh semakin berkurangnya unit kapal ikan yang beroperasi. Faktor kerugian usaha karena kurangnya tangkapan, memperkuat keputusan manajer menarik beberapa unit usaha dari Bone-Bone ke daerah-daerah lain yang potensial.

1.3 Nahkoda/kapten

Nahkoda/kapten adalah seseorang yang ditugaskan atau bertugas memimpin aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan di laut. Termasuk dalam tugas-tugasnya ialah merekrut anak buah kapal (ABK) atau nelayan baru. Berikut segala macam kebutuhan biaya-biaya operasional dan urusan-urusan pinjam meminjam uang antara anak buah dan pengelola ditangani oleh nahkoda. Oleh nahkoda semua kebutuhan tersebut dan urusan ABK disampaikan kepada pengelola. Demikian halnya kepentingan pengelola ke bawah mesti melalui nahkoda.

1.4 ABK/Anak buah tetap

Mereka ini ialah orang-orang yang direkrut untuk menjalankan pekerjaan menangkap ikan, pemeliharaan alat-alat (alat

tangkap, mesin, perlengkapan), dan memelihara kapal/perahu. Pada tingkat anak buah kapal, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang harus ditangani secara khusus oleh orang tertentu, seperti : juru mudi, masinis (*bass*), pemberi umpan (*boy-boy*), dan tukang masak (*koki*). Adapun pekerjaan menangkap ikan merupakan aktivitas inti produksi yang semua anggota kelompok bisa menanganinya, bahkan nahkoda pun terlibat didalamnya. Jumlah anggota kelompok nelayan cakalang yang resmi dalam usaha Plasma minimal 10 orang dan maksimal 18 orang. Semuanya direkrut dari penduduk nelayan Kelurahan Bone-Bone.

1.5 *Kuli jala* anak buah tidak resmi

Disamping ABK/anak buah yang resmi, ada juga anak buah yang disebut "*kuli jala*", yang statusnya tidak tetap dan jumlahnya pun tidak menentu, biasanya bervariasi dari tiga sampai enam orang pada setiap kapal. *Kuli jala* adalah orang-orang dari penduduk Kelurahan Bone-Bone sendiri yang berasal dari berbagai sektor, mata pencaharian yang tidak tetap seperti tukang ojek, tukang becak, tukang batu, nelayan lepas (pemancing yang punya dan tidak punya sampan), dan nelayan ABK/anak buah tetap yang sewaktu-waktu menganggur karena tidak ada tugas atau kapalnya di dok,

sehingga memutuskan untuk ikut ke kapal-kapal cakalang yang beroperasi. Tugas yang dilakukan oleh para kuli jala selama ini terbatas pada penangkapan ikan, yaitu memancing seperti yang dilakukan oleh ABK resmi pada umumnya, tugas-tugas dan jabatan-jabatan seperti *Bass* (masinis), juru mudi, penebar umpan (*boy-boy*) dan tukang masak (*Koki*) tidak mungkin ditangani oleh *kuli jala*, kecuali dalam kondisi dan situasi darurat. Hal tersebut dimungkinkan para kuli jala bisa saja dari peranan-peranan dengan spesifikasi keterampilan seperti itu. Pertimbangannya menurut keterangan nelayan, daripada menganggur beberapa hari tidak ada hasil, lebih baik ikut ke kapal-kapal lain yang beroperasi dengan menjadi *kuli jala*.

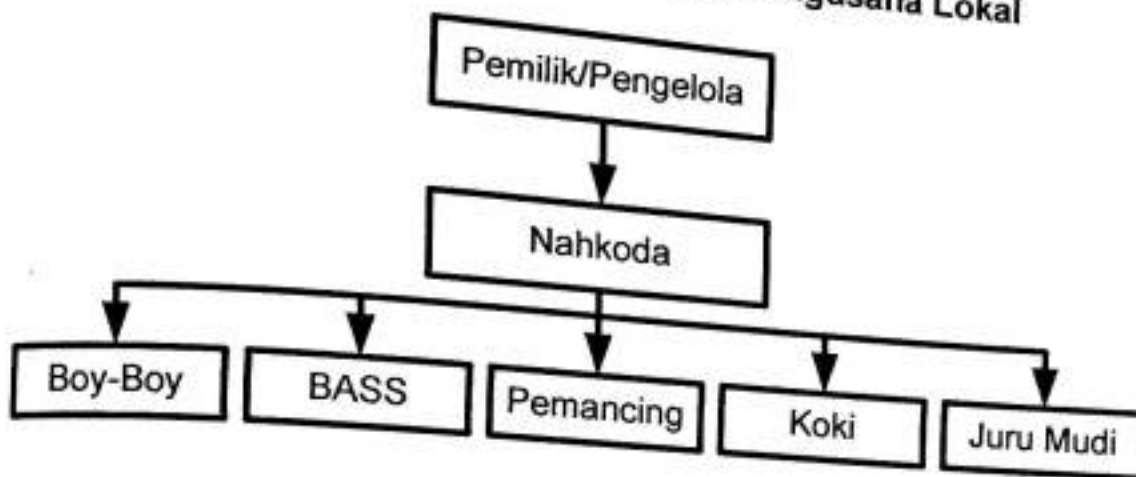
2. Kelompok/Organisasi Nelayan dalam Usaha Cakalang milik Pengusaha Lokal.

Dalam komunitas nelayan di Kelurahan Bone-Bone, disamping bentuk usaha Plasma, sudah ada juga beberapa unit usaha perikanan cakalang milik pengusaha lokal. Mulai di tahun 2000/2001, ada seorang pengusaha nelayan yang dengan kemampuan dan keberanian mengambil resiko mengambil alih satu unit kapal cakalang dari perusahaan Plasma di Flores. Dengan pengelolaan yang baik, pengusaha tersebut mampu

menambah beberapa unit kapal lagi, sementara itu ada juga dua orang pengusaha lainnya menyusul untuk membeli kapal untuk perikanan cakalang hingga awal tahun 2006 tidak kurang dari lima unit kapal perikanan cakalang milik pengusaha lokal.

Berbeda halnya dengan usaha Plasma, kedudukan dan peranan puncak dalam organisasi usaha cakalang milik pribadi penduduk lokal ini tentu saja berada di tangan pemilik itu sendiri. Jadi ciri pengelolaan usaha ialah pengelolaan individual/keluarga dimana pemilik sekaligus manajer, yang dalam beberapa peranan mirip dengan peranan pengelola dalam usaha Plasma. Dibawah pemilik (atau manajer) ada kelompok nelayan aktual (*actual fishermen*) yang terdiri dari nahkoda (*captain*), bersama anak buah kapal (*crewmen*) yang terdiri dari spesifikasi dan tugas/peranan seperti *bass*, *juru mudi*, *boy-boy*, pemancing dan *koki*. Dalam aktivitas penangkapan ikan, sebetulnya semua anggota kelompok termasuk nahkoda sendiri dapat terlibat dalam aktivitas memancing. Seperti halnya dalam usaha Plasma, dalam usaha milik pengusaha lokal juga terlibat kuli jala. Kelompok kerja sama dalam tipe ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Nelayan milik Pengusaha Lokal



2.1 Pemilik/Pengelola

Pemilik/pengelola dalam usaha milik pribadi/keluarga di kelurahan Bone-Bone berperan mengelola modal, pemasaran ikan, merekrut nahkoda, mengontrol anak buah (ABK), mengusahakan serta mengalokasikan biaya-biaya operasional sehari-hari, dan melakukan bagi hasil. Peran/tugas-tugas tersebut merupakan peran/tugas-tugas formal. Diluar peran/tugas-tugas formal tersebut, ada juga peran/tugas-tugas informal, terutama berkaitan dengan jaminan sosial ekonomi pada anak buah.

2.2 Nahkoda

Seperti halnya pada bentuk kelompok/organisasi dalam unit usaha Plasma, nahkoda pada unit usaha cakalang milik pengusaha lokal, juga direkrut oleh pengusaha. Semua

nahkoda kapal perikanan cakalang pada kedua bentuk usaha tersebut direkrut dari komunitas nelayan setempat. Dalam mendapatkan nahkoda, biasanya pemilik yang mencari nahkoda yang menganggur, kalau bukan nahkoda yang menganggur sendiri yang menawarkan diri kepada pemilik kapal. Bagi pemilik lokal dan pengelola, mereka selalu mencari seorang nahkoda yang berpengalaman dan terampil, dan berkepribadian baik seperti : berani, jujur, setia, taat, bertanggung jawab, teliti dan, sabar. Tipe atau ciri seorang nahkoda tersebut disamping diidealkan untuk seorang nahkoda, juga menjadi syarat dalam perekrutan anak buah kapal.

Tugas/peranan yang baku dari nahkoda ialah merekrut anak buah kapal, memimpin aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan. Dalam merekrut anggota, sebetulnya pemilik kapal yang sekaligus sebagai manajer usaha (bukan istilah lokal), juga dapat merekomendasikan orang-orang tertentu (kerabat, teman) kepada nahkoda untuk menjadi anak buah kapal.

Nahkoda-lah yang menentukan kapan pemberangkatan dilakukan, tempat lokasi penangkapan yang dituju, mengawasi pelayaran dan aktivitas penangkapan dan menentukan saat-saat berhenti bekerja. Tugas yang menyolok lainnya dari

nahkoda ialah menyediakan segala kebutuhan di kapal, memeriksa kondisi kapal, mesin, peralatan, dan perlengkapan dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, dan pergantian. Berikut nahkoda merinci dan menghitung semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dilaporkan kepada pemilik yang bertugas mengeluarkan atau menanggung semua biaya-biaya tersebut.

2.3 Juru mudi

Ialah salah seorang anak buah kapal yang diserahi tugas atau peranan khusus yang sangat menentukan dalam pelayaran, yakni menangani kemudi yang mengarahkan pelayaran pada lokasi-lokasi tujuan pada pemberangkatan pergi maupun pulang kedarat. Disamping menangani tugas khusus tersebut pengemudi juga melakukan tugas pokok lainnya, yaitu penangkapan, dalam hal ini memancing dan memindahkan ikan dari kapal ke dermaga.

2.4 Juru mesin (*bass*)

Adalah salah seorang anak buah kapal yang menangani mesin sebagai sarana penggerak kapal. Rincian aktivitas rutin dan pokok seperti menghidupkan dan mematikan mesin, mengisi bahan bakar dan oli ke dalam tangki, memeriksa kondisi seluruh komponen dan merawat mesin. Seperti halnya juru

mudi, bass juga melakukan pekerjaan pokok lainnya yakni manangkap/memancing ikan.

2.5 Penebar umpan (*boy-boy*)

Salah satu peranan/tugas yang khas/unik dalam perikanan cakalang, khususnya pada kelompok-kelompok nelayan Kelurahan Bone-Bone ialah *boy-boy*. *Boy-boy* ialah orang yang secara khusus melakukan bagian tersebut. Bagian kerja tersebut ialah penebaran umpan yang dilakukan pada saat ditemukan kelompok ikan pada suatu lokasi. Pekerjaan tersebut dimulai atas kesepakatan anggota kelompok dan perintah dari nahkoda. Penebaran umpan menandakan dimulainya aktivitas penangkapan/pemancingan. Perlu diketahui bahwa hanya penangkapan ikan dengan memancing yang memerlukan umpan. Tanpa memancing, tidak ada tugas penebaran/pembuangan umpan tersebut. Berbeda halnya dengan juru mudi dan *bass*, *boy-boy* tidak melakukan penangkapan. Hal tersebut disebabkan pekerjaan menebar umpan bersamaan dengan memancing.

2.6 Pemancing

Tugas/peranan paling pokok dalam usaha perikanan, khususnya usaha cakalang ialah penangkapan ikan, yang dalam hal ini ialah memancing. Segala bagian kerja lainnya,

baik yang utama atau yang tidak terlalu utama sebetulnya dimaksudkan atau diperuntukkan bagi terlaksananya dan keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan sebagai pusat atau paling pokok. Boleh dikatakan bahwa semua anggota kelompok bisa melakukan dan terlibat dalam aktivitas tersebut.

2.7 Tukang masak (*koki*)

Menyediakan bahan makanan dan minuman (mengolah, memasak dan menyajikannya di atas kapal). Hal ini merupakan spesifikasi kerja yang memerlukan seorang anggota kelompok untuk managernya. Pada kelompok nelayan cakalang Kelurahan Bone-Bone tugas tersebut bukanlah suatu spesialisasi yang ekstrim, sebab kebanyakan anggota kelompok lainnya, kecuali nahkoda, juru mudi, bass, bisa juga memberi bantuan/terlibat hingga batas-batas tertentu. Sebaliknya seseorang yang secara khusus ditugaskan oleh nahkoda menjadi tukang masak juga melakukan penangkapan ikan sebagai aktivitas paling pokok.

2.8 *Kuli jala*

Seperti halnya dalam kelompok usaha Plasma, dalam kelompok usaha milik pengusaha lokal pun terlibat *kuli jala* sebagai anggota tidak resmi/permanen. Mereka itu hanya ikut

terlibat ketika tidak tersedia pekerjaan yang lebih disukai di darat. Demikian halnya ketika kapal yang diikuti oleh para ABK permanen tidak beroperasi karena tidak tersedia umpan atau karena kapal kapal mereka sedang didok. Bagian aktivitas yang dilakukan oleh kuli jala ialah memancing. Tidak ada perbedaan jumlah antara *kuli jala* yang terlibat dalam kapal usaha milik pengusaha lokal dan kapal usaha Plasma.

C. Sistem Bagi Hasil Nelayan Cakalang

Seperti halnya komunitas nelayan pada umumnya, nelayan dalam sistem ekonomi perikanan cakalang, nelayan kelurahan Bone-Bone juga diterapkan Sistem bagi hasil. Berbeda halnya dengan sistem pengupahan/penggajian, dalam sistem bagi hasil ditetapkan bahwa bagian pendapatan setiap anggota nelayan bersumber sepenuhnya dari hasil tangkapan nelayan. Sebagai konsekuensi logisnya bahwa kalau tangkapan banyak, maka kondisi pendapatan setiap anggota, termasuk pemilik usaha dan nahkoda, juga banyak. Sebaliknya kalau tangkapan sedikit, maka kondisi pendapatan setiap anggota kelompok juga sedikit. Bahkan ketika tidak ada tangkapan sama sekali, maka pendapatan bagi nelayan pada saat itu tidak ada. Oleh karena itu setiap anggota kelompok, khususnya ABK, pasti memerlukan uang untuk pemenuhan kebutuhan pokok bagi keluarganya yang tidak bisa ditunda-tunda, maka dalam kondisi demikianlah mekanisme

tolong-menolong difungsikan. Sumber pertolongan, apakah berupa pemberian cuma-cuma atau pinjaman dari pemilik usaha/pengusaha dan pengelola (mekanisme pemberian bantuan yang dimaksudkan digambarkan pada sub bab lain.

Sistem/aturan bagi hasil yang diterapkan dalam usaha perikanan cakalang nelayan Bone-Bone menggariskan 50% untuk pemilik dan 50% untuk ABK bersama nahkoda setelah dikeluarkan biaya-biaya operasional yang semuanya ditanggung oleh pemilik lokal dan pengelola. Sistem bagi hasil seperti ini dikenal dimana-mana, termasuk komunitas nelayan Bone-Bone dengan istilah "*fifti-fifti*" (dari Bahasa Inggris "*fifty-fifty*").

Pembagian hasil dalam kelompok nelayan cakalang kelurahan Bone-Bone dilakukan setelah uang hasil penjualan ikan dianggap sudah mencukupi (layak untuk dibagi). Bilamana tangkapan selama dua atau tiga kali operasi sudah cukup, maka dilakukanlah bagi hasil. Menurut keterangan informan Ld. Sairi (44 th) bahwa rata-rata dalam sebulan dilakukan dua sampai tiga kali pembagian hasil. Bahkan ketika kondisi populasi ikan sudah mulai merosot sejak akhir periode 1990-an, maka dalam sebulan hanya dapat dilakukan bagi hasil sebanyak satu atau dua kali saja. Tidak seperti sebelumnya, ketika populasi ikan masih melimpah dimana bagi hasil dapat dilakukan tiga sampai empat kali dalam sebulan.

Contoh sistem bagi hasil yang dilakukan dalam salah satu kelompok kerja nelayan cakalang milik pengusaha lokal seperti berikut :

Bagi hasil yang diperoleh seorang pemilik kapal adalah sebanyak 50 persen dari total uang kas yang dibagi pada setiap periode tertentu setelah dikeluarkan sejumlah ongkos dan biaya operasional. Sesuai dengan penuturan Alimuddin (54th) bahwa :

"Apabila dalam satu periode bagi hasil jumlah uang kas yang terkumpul sebanyak Rp. 20.000.000,- dan jumlah biaya produksi selama periode tersebut sebanyak Rp. 5.000.000. Maka jumlah uang kas tersebut (Rp. 20.000.000,-) dikurangi dengan biaya operasional (Rp. 5.000.000,-). Sehingga sisa uang kas bersih yang akan dibagi adalah Rp. 15.000.000,-. Dengan demikian Pemilik memperoleh bagian sebesar 50 persen dari Rp. 15.000.000,- atau sama dengan Rp. 7.500.000. Jika ABK berjumlah 10 orang, maka uang sebesar Rp.7.500.000 akan dibagi 1,5 bagian." (wawancara Tanggal 12 Juli 2006)

Adapun tatacara bagi hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1. Jumlah Bagian Masing-masing ABK berdasarkan Bagi Hasil

No.	Posisi Personil ABK	Proporsi Bagian	Jumlah (Rp)
1.	Nakhoda	1,5	978.260,85
2.	Bass	1,5	978.260,85
3.	Boy-Boy	1,5	978.260,85
4.	Juru Mudi	1	652.173,90
5.	Pemancing 1	1	652.173,90
6.	Pemancing 2	1	652.173,90
7.	Pemancing 3	1	652.173,90
8.	Pemancing 4	1	652.173,90
9.	Pemancing 5	1	652.173,90
10.	Koki	1	7.500.000,00
	Jumlah		

Sumber : data lapangan yang diolah 2006

Sedangkan pada kelompok kerja nelayan cakalang milik Plasma, dari uang hasil kas pembagian juga dilakukan secara *fifti-fifti*, yaitu Plasma dan

pengelola mendapat 50% dari uang kas dan 50% sisanya dibagi untuk ABK kapal setelah dipotong biaya operasional. Apabila dalam satu periode penangkapan, uang kas berjumlah Rp. 20.000.000, biaya operasional Rp. 5.000.000, maka uang kas senilai Rp. 20.000.000 dikurangi dengan biaya operasional Rp. 5.000.000 Sehingga sisa uang kas bersih yang akan dibagi adalah Rp. 15.000.000,-. Plasma dan pengelola mendapat 50% dari uang kas tersebut, sehingga jumlahnya Rp. 7.500.000. selanjutnya hasil tersebut dibagi dua untuk masing masing, sehingga Plasma mendapat Rp. 3.750.000 dan pengelola mendapat Rp. 3.750.000. Pada pembagian hasil di ABK sama halnya dengan kelompok kerja nelayan cakalang milik pengusaha lokal.

D. Pranata Informal dalam Unit Usaha yang Memberi Jaminan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan ABK

Di dalam usaha perikanan cakalang, komunitas nelayan Kelurahan Bone-Bone telah melembagakan aktivitas yang sifatnya informal yang berfungsi memberi jaminan sosial ekonomi yang sangat berarti bagi nelayan dan keluarga-keluarganya. Pada kebanyakan penduduk Kelurahan Bone-Bone yang tanpa pekerjaan tetap, pranata-pranata informal yang dimaksudkan adalah aturan kesepakatan dalam kelompok untuk memberikan pinjaman atau bantuan cuma-cuma kepada setiap anak buah yang sangat membutuhkannya. Di samping itu juga dilembagakan pelibatan kuli jala dalam

kegiatan penangkapan ikan sehari-hari. Kedua bentuk pranata informal tersebut digambarkan berikut ini.

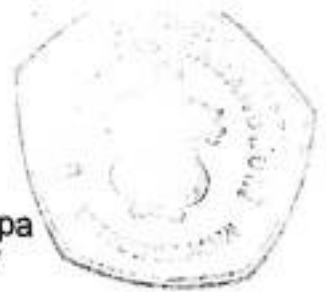
1. Aturan Kesepakatan Pemberian Pinjaman dan Bantuan Cuma-Cuma
Dalam kelompok nelayan cakalang, khususnya kelompok yang mengelola usaha milik pengusaha lokal, ada aturan dan praktik kesepakatan untuk memberi pinjaman atau bahkan bantuan cuma-cuma kepada setiap anak buah yang sangat membutuhkannya. Aturan dan praktik tersebut sifatnya informal karena sudah diluar struktur dan mekanisme formal berupa aturan bagi hasil yang formal.

Dalam praktik pemberian pinjaman yang disepakati oleh semua anggota kelompok (pemilik atau pengusaha dan para anak buah) bahwa bagi anak buah yang sangat membutuhkan uang karena kehabisan bahan makanan, sakit atau kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak untuk dipenuhi, maka dia dapat memperoleh pinjaman yang sumbernya bisa dari kas usaha kelompok atau dari kas milik pribadi pengusaha/pemilik alat-alat produksi (kapal, mesin, alat tangkap).

Seorang pemilik/pengusaha lokal (H. Kasim), mengungkapkan hal itu:

"Menolong anak buah dengan memberikan sejumlah uang yang tanpa dikembalikan atau pinjaman yang dikembalikan dikemudian hari sudah menjadi kebiasaan dalam kelompok kami, mungkin juga dalam kelompok-kelompok nelayan cakalang yang lain. Ini dilakukan karena seringkali para anggota mengalami kehabisan aung, yang dalam saat bersamaan muncul berbagai kebutuhan keluarganya yang mendesak. Mengenai apakah seseorang perlu diberikan tanpa pengembalian atau pinjaman, apakah uang yang diambil dari

kas kelompok atau kas pribadi pemilik/pengusaha, dan berapa jumlah uang yang diberikan selamanya melalui kesepakatan" (wawancara, 13 juli 2006)



Dalam praktiknya, ketika seorang anak buah atau anggota membutuhkan uang, maka dia datang pada nahkoda untuk menyampaikan maksudnya tersebut, berikut nahkoda menyampaikan hal ini pada pemilik/pengusaha. Untuk itu, sebaliknya pemilik meminta kepada nahkoda agar memanggil semua anak buah yang lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengadakan pertemuan untuk mufakat. Dalam pertemuan untuk mufakat, terdapat sekurang-kurangnya tiga hal penting yang dibicarakan ; (1) apakah anak buah yang berkepentingan layak untuk diberi pinjaman atau bantuan; (2) berapa banyak uang yang diberikan kepadanya dan; (3) pinjaman atau bantuan bersumber dari mana, apakah kas usaha (milik kelompok) atau kas pribadi pemilik usaha/pengusaha sendiri.

Mengenai hal yang pertama, kondisi sosial ekonomi biasanya banyak diketahui oleh nahkoda sebagai pemimpin kelompok nelayan. Oleh karena itu, informasi dan pertimbangan dari nahkodalah yang banyak menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan bersama tentang layak atau tidaknya seseorang diberikan pinjaman atau bantuan. Pertimbangan nahkoda juga banyak menjadi bahan untuk menentukan besar kecilnya jumlah uang yang diberikan kepada seseorang anggota yang membutuhkannya. Di samping itu, kondisi kas usaha kelompok

juga menjadi bahan pertimbangan para anggota dan pemilik untuk memutuskan pemberian bantuan dan jumlah uang yang diberikan. Mengenai sumber pemberian pinjaman atau bantuan cuma-cuma juga dibicarakan dan diputuskan secara bersama anggota kelompok. Menurut keterangan dari beberapa nahkoda dan pemilik usaha bahwa kedua belah pihak pemilik/pengusaha dan anak buah (nahkoda bersama anggota) sama-sama mempunyai hak dalam pembuatan keputusan pemberian pinjaman atau bantuan. Jadi bukan hanya pemilik/pengusaha yang mempunyai kekuatan, kemauan, dan hak dalam keputusan pemberian pinjaman atau bantuan. Demikian juga, menurut keterangan, semua anggota berhak memperolehnya tergantung pada tingkat kelayakan yang banyak diketahui oleh nahkoda. Hanya saja realisasi pemberian pinjaman atau bantuan seperti itu tentu saja dilakukan dalam situasi dan waktu-waktu yang berbeda-beda.

Seorang nahkoda (Zaenuddin) menceritakan :

"Tidak asal anggota membutuhkan dan meminta bantuan lalu kelompok atau pemilik usaha terus memutuskan untuk memberikan bantuan seperti itu. Seseorang yang bersangkutan terlebih dahulu diteliti kondisi kelayakannya, apakah dia betul-betul memntuhkannya, apakah dia masih atau sudah tidak brutang lagi kepada kas kelompok atau pemilik, apakah yang bersangkutan termasuk rajin dan tekun bekerja. Karena yang mengetahui hal-hal tersebut adalah nahkoda, maka nahkodalah yang menelitinya terlebih dahulu sebelum pinjaman atau pemberian diputuskan untuk diberikan bantuan cuma-cuma".
(Wawancara tanggal 14 juli 2006)

Mengenai bentuk pemberian, apakah dalam bentuk pinjaman atau bantuan cuma-cuma, juga diputuskan secara bersama-sama. Biasanya, menurut keterangan, kalau kebutuhan seseorang yang berkepentingan cukup besar, yaitu Rp. 350.000 ke atas, maka disepakati sebagai pinjaman yang harus dikembalikan dikemudian hari. Prosedur pengembalian utang, menurut keterangan adalah ringan kerana dilakukan dengan pemotongan bagian hasil saja, bukan menyerahkan sejumlah uang yang diambil dari saku atau simpanan peminjaman. Mengenai waktu pengembalian juga tidaklah ketat karena kapan saja ketika penghasilan cukup besar baru bisa dikembalikan.

Bilamana kebutuhan seseorang anggota hanya sedikit, yaitu dibawah Rp. 350.000, maka hal ini biasanya disepakati untu diberikan sebagai bantuan cuma-cuma semata (tanpa dikembalikan). Semua anggota kelompok, termasuk pemilik menyetujui hal ini karena asusmsinya semua yang membutuhkan akan dapat giliran seperti itu juga.

Seperti disebutkan di muka bahwa sumber perolehan bantuan ada dua, yakni kas usaha milik bersama kelompok dan kas pribadi pengusaha/pemilik alat-alat produksi. Adanya dua sumber bantuan tersebut memberi jaminan yang kuat akan kepastian perolehan bantuan bagi anak buah yang membutuhkannya. Biasanya mula-mula bantuan pinjaman atau bantuan cuma-cuma diusahakan dalam kas kelompok kerjasama, kemudian bilamana kas kelompok dianggap belum

mencukupi, barulah diusahakan pada kas pengusaha/pemilik. Baik pada kas kelompok nelayan anak buah, maupun kas pribadi pemilik/pengusaha dapat diterapkan pinjaman atau bantuan cuma-cuma. Muhti (nahkoda) mengatakan :

"Jarang sekali permintaan bantuan oleh seseorang ditolak karena adanya dua sumber perolehan bantuan, yakni kas kelompok atau kas pemilik usaha, kecuali ada beberapa anggota secara bersama-sama mengajukan permohonan. Kalau demikian halnya, maka terpaksa ada yang didahulukan dan ada yang ditunda. Pihak yang dimintai pertimbangan untuk didahulukan atau ditunda adalah nahkoda."
(Wawancara tanggal 14 Juli 2006)

2. Pelibatan Sebagian Penduduk Nelayan Bone-Bone Sebagai *Kuli Jala*.

Sudah disebutkan di muka bahwa dalam kelompok-kelompok nelayan cakalang, baik dalam unit usaha milik pengusaha lokal, maupun dalam unit usaha plasma terdapat anggota atau anak buah tidak tetap (tidak permanen), mereka itu disebut *kuli jala*. Mereka berasal dari penduduk Kelurahan Bone-Bone yang tidak mempunyai pekerjaan tetap di darat, seperti tukang ojek, kuli-kuli bangunan, para pengangguran, anak sekolah tingkat menengah umum (SMU) di hari hari libur.

Nelayan miskin yang hanya mengoperasikan sampan tanpa motor juga banyak terlibat sebagai kuli jala tersebut. Para nelayan miskin di Kelurahan Bone-Bone yang tidak kurang dari 20 orang memilih menjadi *kuli jala* ketika pendapatan mereka dalam kondisi sangat minim, karena

ikan-ikan yang mereka cari tidak mendekati daerah perairan pantai sebagai lokasi penangkapan mereka.

Anton (kuli jala) menceritakan :

"Berbagai pekerjaan kasar di sini sudah pernah saya lakukan untuk mencari penghasilan. Salah satu yang saya syukuri ialah menjadi *kuli jala*. Banyak orang dengan keluarganya tertolong dari aktifitas tersebut, bukan hanya penduduk dan orang-orang yang tidak menentu pekerjaannya, tetapi juga sebagian besar nelayan tetap dari kapal-kapal cakalang yang tidak melaut karena tidak ada umpannya atau sedang dok."
(Wawancara tanggal 16 Juli 2006)

Hal yang menarik perhatian bahwa ternyata sebagian besar nelayan berstatus anak buah kapal (ABK) nelayan cakalang yang permanen juga dapat menjadi *kuli jala*. Keterlibatan mereka menjadi *kuli jala* dimungkinkan oleh seringnya beberapa kapal (dimana mereka menjadi ABK resmi) tidak beroperasi karena kapalnya di dok atau karena tidak tersedianya umpan. Setiap kapal cakalang di Kelurahan Bone-Bone, menurut keterangan, pasti pernah di dok dan dalam kondisi tidak mempunyai persediaan umpan. Sudah menjadi kebiasaan bahwa kapal cakalang yang beroperasi (melaut) merupakan tumpuan harapan untuk bekerjanya sebagian nelayan cakalang resmi yang menganggur kerana kapalnya tidak melaut. Ada penyediaan peluang kerja dan perolehan pendapatan secara timbal balik di antara usaha-usaha perikanan cakalang tersebut. Pada satu sisi, penyerapan tenaga kerja *kuli jala* akan memberikan keuntungan kerja dalam peningkatan jumlah tangkapan dan

perolehan pendapatan bagi para penganggur dan pekerja tidak tetap pada sektor-sektor ekonomi lain di darat pada sisi lainnya.

Mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan berbeda dengan yang diterapkan dalam kelompok nelayan cakalang yang resmi. Kalau aturan bagi hasil yang formal menetapkan 50%:50% (fifti-fifti), dalam praktik pelibatan *kuli jala* diterapkan bahwa setiap hasil tangkapan dari setiap nelayan kuli jala hanya dikeluarkan sebesar 40%, sisanya yang 60 % menjadi bagian setiap kuli jala. Misalnya, seorang *kuli jala* menangkap 10 ekor cakalang, maka sebanyak 4 ekor diserahkan kepada kelompok ABK resmi (untuk pemilik) dan 6 ekor menjadi bagian *kuli jala*. Jadi kalau ada 5 orang kuli jala (dalam 1 kapal) masing-masing menangkap 10 ekor cakalang, maka secara keseluruhan terdapat hanya sebanyak 20 ekor diserahkan ke kelompok ABK resmi.

Dapat dinilai bahwa dengan aturan bagi hasil yang secara formal berlaku dalam usaha perikanan cakalang, bersama dengan praktik *kuli jala* yang menerapkan bagi hasil 60% (bagi kuli jala) : 40% (bagi kelompok ABK resmi) dapat menjamin secara relatif bagi kondisi sosial ekonomi para keluarga nelayan ABK, nelayan miskin, dan sebagian besar penduduk penganggur semua yang tidak menentu perkerjaan dan penghasilannya. Bagi nelayan ABK perikanan tongkol sendiri, aturan kesepakatan (aturan tidak resmi) dalam pemberian pinjaman dan bantuan cuma-cuma yang

bersumber dari kas kelompok dan pemilik juga memberi jaminan sosial ekonomi yang berarti.

E. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Nelayan Cakalang

Dalam hal kondisi sosial ekonomi, nelayan cakalang dapat dikatakan berada pada tingkatan yang lebih tinggi, apabila dibandingkan dengan nelayan *katingting* dan *pabose-bose*, mengingat tingkat pendapatan serta pemasaran hasil tangkapan jauh lebih baik. Sesuai dengan penuturan informan Laode Sairi (44 th) :

"Memang penangkapan itu tergantung musim, tetapi hasil tangkapan tidak takut untuk tidak laku karena ada perusahaan yang siap menampung hasil tangkapan. Selain itu para ABK bisa mendapat pinjaman atau bantuan dari uang kas atau dari pemilik untuk keperluan hidupnya sehari-hari."
Wawancara tgl 13 Juli 2006

Pendapatan dari hasil penangkapan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti beras, minyak dan kebutuhan hidup anak. Jika dilihat dari pengeluaran untuk kebutuhan hidup dalam sebulan, uang pendapatan dari bagi hasil cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti yang dituturkan oleh Syamsiah (42 th) :

"Saya memasak kira-kira 3 liter tiap hari, sedang kalau untuk minyak tanahnya biasanya 1 liter, biasanya juga saya beli sayur yang harganya Rp. 2000. Ada juga untuk jajan anak saya biasanya Rp. 2000 dalam setiap hari."
Wawancara tgl 13 Juli 2006

Penggunaan uang hasil pendapatan dapat dilihat pada tabel dalam jangka waktu sebulan, dan harga barang di dapat dari wawancara di pasar Wamoe :

Tabel IV. 2. Biaya kebutuhan hidup sehari-hari

Perincian Pengeluaran	Biaya
Beras : 3 liter/hari x Rp 3500 x 30	Rp. 315.000,-
Minyak tanah : 1 liter/hari x Rp. 3000 x 30	Rp. 90.000,-
Sayur : Rp.2000/hari x 30	Rp. 60.000,-
Jajan anak ; Rp. 2000/hari x 30	Rp. 60.000,-
Jumlah	Rp. 525.000,-

Sumber : data lapangan yang diolah 2006

Jika jangka waktu bagi hasil selama sebulan, maka pendapatan nelayan ABK cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Karena asupan pendapatan yang mencukupi, maka hal ini berimbas kurangnya kemapanan dan pengetahuan pengelolaan pendapatan mereka. Konsepsi ini berawal dari pengetahuan masyarakat lokal mengenai laut, menurut beberapa informan yang diwawancarai, bahwa hasil laut selalu melimpah dan selalu menyediakan sumber ekonomi yang teramat potensial bagi kelangsungan hidup manusia, seperti ikan dan biotik laut lain yang mempunyai nilai ekonomi.

Berangkat dari hal ini menimbulkan nilai kecenderungan individu-individu (khususnya nelayan ABK) untuk selalu menghabur-hamburkan hasil

pendapatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan Djahar,SH (41 th) bahwa :

"uang dari hasil yang mereka terima kalau cuma digunakan untuk kebutuhan hidupnya biasanya sudah cukup tapi ada kebiasaan buruk yang sering dilakukan terutama ABK, seperti Judi kupon putih, kiu-kiu, miras dan, nelayan yang masih anak muda sering ke tempat hiburan malam....."
Wawancara Tgl 23 Juli 2006

Dari penuturan ini menyebabkan uang yang diterima dari hasil penangkapan sering kali tidak dapat mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup karena gaya hidup para ABK yang sering menghambur-hamburkan hasil pendapatan. Esensi utama mereka melakukan hal itu lebih terdorong kepada nuansa psikologis pada saat melaut yang dimana realitas yang dihadapi oleh nelayan cakalang selalu riskan dengan terjadinya kecelakaan pada saat melaut.

Jadi akumulasi-akumulasi kejadian yang mereka alami di lapangan lebih bersifat pengendoran psikologis, indikasi pengendoran psikologis pada hal ini lebih cenderung kepada transformatif fisik dengan keganasan alam, maka tak mengherankan rata-rata para nelayan utamanya ABK disaat di darat mereka lebih senang memanjakan diri dengan menghambur-hamburkan hasil pendapatan untuk kepuasan psikologis.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang sistem bagi hasil nelayan cakalang kelurahan Bone-Bone, dapat diuraikan sebagai berikut :

Kelompok kerjasama nelayan cakalang di kelurahan Bone-Bone terbagi dalam dua kategori yaitu, kelompok kerjasama nelayan cakalang milik Plasma dan kelompok kerjasama nelayan cakalang milik pengusaha lokal. Dimana anggota nelayan (ABK) tersebut merupakan penduduk Kelurahan Bone-Bone yang dalam proses perekrutannya diambil melalui sosial dan ikatan sosial yang berdasarkan atas hubungan kekerabatan.

Pada kelompok kerjasama nelayan cakalang milik Plasma, aturan bagi hasilnya adalah *fifti-fifti*. Dimana Plasma dan pengelola mendapat bagian 50 % dari hasil bersih dan 50 % untuk ABK. Di dalam ABK, adapula posisi yang mempunyai bagian lebih yaitu nahkoda, bass, boy-boy.

Pada kelompok kerjasama nelayan cakalang milik pengusaha lokal aturan bagi hasilnya sama dengan kelompok kerjasam nelayan cakalang milik Plasma yaitu *fifti-fifti*, hanya saja pemilik mendapat bagian 50% dari hasil bersih tanpa dibagi sama siapapun. 50% sisanya dibagi oleh para ABK kapal. Nahkoda, bass, boy-boy mendapat bagian yang lebih.

Pada umumnya nelayan cakalang Kelurahan Bone-Bone memanfaatkan pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti seperti beras, minyak dan kebutuhan hidup anak. Jika bandingkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk kebutuhan hidup dalam jangka waktu satu bulan, pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup nelayan dan keluarganya sehari-hari. Tetapi ada kebiasaan berfoya-foya dikalangan para ABK kapal yaitu judi kupon putih, kiu-kiu, miras dan, nelayan yang masih anak muda sering ke tempat hiburan malam. Hal ini menjadikan pendapatan para ABK tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Di dalam usaha perikanan cakalang komunitas nelayan kelurahan Bone-Bone terdapat pranata-pranata yang sifatnya informal yang berfungsi memberi jaminan sosial ekonomi yang sangat berarti bagi keluarga-keluarga nelayan anak buah khususnya. Yaitu aturan kesepakatan dalam kelompok untuk memberikan pinjaman atau bantuan cuma-cuma kepada setiap anak buah yang sangat membutuhkannya dan sistem pelibatan kuli jala dalam kegiatan penangkapan ikan sehari-hari. Hal ini secara tidak langsung dapat memberikan kelangsungan hidup nelayan, khususnya nelayan ABK.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan setelah melihat kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan tentang manajemen keuangan keluarga dan pemanfaatan-pemanfaatan penghasilan yang dapat dilakukan oleh nelayan khususnya ABK serta perlunya penyediaan koperasi nelayan.
2. Pranata Informal seperti menjadi kuli jala dan aturan kesepakatan pemberian pinjaman dan bantuan cuma-cuma harus terus dilestarikan. Karena hal ini dapat menjaga kesimbangan kehidupan masyarakat nelayan cakalang Kelurahan Bone-Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid. 1982. *Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Sektor Kemaritiman di Sulawesi Selatan (Suatu Studi Sosio Antropologi Ekonomi)*. Bappeda Sulawesi Selatan-UNHAS. Ujung Pandang
- Acheson, J.M 1981. *Anthropology of Fishing*. Annual Review Anthropology Inc. No. 10: 275-316.
- Cahyono, Imam, 2005. *Wajah Kemiskinan. Wajah Perempuan*. Jurnal Perempuan No 42.
- Carnea, Michael, M. 1988. *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan; Variabel-Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan*. Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Conyers, Diana, 1981. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Penerjemah Susetiawan. Yogyakarta
- Dahuri, Rokhmin dkk, 1997. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradya Paramitha, Jakarta
- Dani, SW. 2006. *Nelayan Tradisional, Realita Kemiskinan*. Website <http://www.pikiran-rakyat.co.id>. Diakses tanggal Kamis, 09 Februari 2006.
- Koentjaraningrat, 1982. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Kusnadi, 2002. *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*. LKIS, Yogyakarta.
- _____, 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. LKIS. Yogyakarta
- Kusumastanto, T, 2003. *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Lampe, Mungsi, 1989. *Strategi-Strategi Adaptif yang Digunakan Nelayan Madura Dalam Kehidupan Ekonomi Perikanan Lautnya*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

_____, 1995. *Strategi adaptif Masyarakat Nelayan* (Essey, Buletin Antropologi). IKA Press. Ujung Pandang

_____, 1999. *Potensi dan Kendala Dalam Pengelolaan Terumbu Karang (Pedoman Untuk Intervensi Pengelolaan Berbasis Masyarakat), Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan terumbu Karang (COREMAP) – PPT-LIPI Jakarta*

_____, 2004. *Bahan Kuliah Wawasan Sosial Budaya bahari (WSBB), Aspek Sosial Budaya.UPT-MKU Universitas Hasanuddin. Makassar*

Mattulada, 1979. *Masyarakat Pesisir dilihat dari Sudut Pandang Antropologi dan Sosiologi, Dalam Pengembangan Sumberdaya Kelautan, Vol 1 (Aspek Sosial Budaya) Lepas UNHAS, Ujung Pandang*

Maleong, Lexy, 1993 *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta

Mintaroem, Karjadi, dkk. 2005 *Aspek Sosial-Budaya Pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional (Studi pada Masyarakat Nelayan Tradisional di Desa Bandaran, Pamekasan)*. Website [Http://jsi.co.org/jsi_volume11.2.htm](http://jsi.co.org/jsi_volume11.2.htm). diakses tgl 22 Mei 2006

Mubyarto, 1984. *Nelayan dan Kemiskinan (Suatu Study Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai)*, Jakarta. Rajawali Press.

Muchlis dan Robinson dkk, 1984. *Masyarakat Pantai*. Lepas Unhas, Ujung Pandang

Nishimura, Asahitaro 1973 "A Preliminary Report on Current Trends in Marine Anthropology," (Occasional Papers of The Center Marine Ethnology, No. 1 Japan)

Pelras, C. 1996. *The Bugis*. Black Well Publishers.

Rusli, Said dan Sumardjo, dkk. 1995, *Mitologi Identifikasi Golongan Miskin dan Daerah Miskin; Suatu Tinjauan dan Alternatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Saad, Sudirman, 2000. "Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Eksistensi dan prospek pengaturannya di Indonesia"; disertasi, Program Studi Hukum, Fakultas Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Saifuddin, Achmad Fedyani, 2005 *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Prenada Media, Jakarta

Sallatang, Arifin, 1982 *Pinggawa-Sawi: Suatu Studi Kelompok Kecil*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

Semedi, Pujo, 2001. "Closed To The Stone, far from the throne, The Story of A Javanese Fishing Community, 18205-19905", Disertasi, Facultiest Den Maatschappijen Gedreg Swetenchappen, Universiteit Van Amsterdam.

Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sudharto, 1989. *Motorisasi dan Perubahan Sosial*. LPPIS, Ujung Pandang

Suparlan, Parsudi, 1994. *Kemiskinan di Minangkabau*, makalah disampaikan pada Seminar Dasa Warsa Pengembangan Kebudayaan, Padang.

Suryani, Nursyam, 1997. *Organisasi Sosial Punggawa Sawi Sebagai Mekanisme Adaptif Masyarakat Nelayan Rangge di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ujung Pandang

Suyono, Aryono. 1985. *Kamus Antropologi*. Akademika Presindo. Jakarta

Tang, Mahmud, dkk, 2005. *Kajian Sekuritas nelayan bagi Keluarga Miskin di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara dan Kota Temate*. Kerjasama Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial dengan Lembaga Penelitian Unhas. Jakarta.